

**KONSEP 'ASHABIYAH IBN KHALDUN DALAM PENGUATAN
NILAI NASIONALISME DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Gelar Sarjana (S-1) Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh:

SYAFRIZAL

NIM 23123054



FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2017

ABSTRAKSI

Nasionalisme bangsa Indonesia merupakan perwujudan rasa cinta bangsa Indonesia terhadap Negara dan tanah air berdasarkan Pancasila. Kemajemukan yang ada pada Indonesia sering kali menimbulkan berbagai masalah dalam lapisan masyarakat. seperti banyaknya tindakan anarkis yang sering terjadi, banyak konflik antar ras, suku dan agama. Ini semua mengakibatkan berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Saat ini konsep '*Ashabiyah*' kurang begitu dikenal dalam suatu negara karena tergantikan dengan konsep nasionalisme. Kedua konsep ini merupakan bagian dari politik bernegara yang terkadang diidentikan atau dibedakan sama sekali karena memiliki persamaan dan perbedaan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana ide dan nilai nilai nasionalisme yang ada dalam konsep '*Ashabiyah*' Ibn Khaldun. relevansinya konsep '*Ashabiyah*' terhadap negara Indonesia. Dan konsep '*Ashabiyah*' menjadi solusi atas tantangan sudah melemahnya nilai nasionalisme di Indonesia.

'Ashabiyah' memiliki persamaan dengan nasionalisme karena keduanya merupakan alat pemersatu untuk mempertahankan Negara, sebagai solusi untuk mengatasi semua permasalahan di Indonesia ini adalah dengan menumbuhkan kembali rasa solidaritas (*'Ashabiyah*) dan memilih seorang pemimpin yang hebat dan tangguh juga dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk tetap menggalang persatuan dan kesatuan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam, karena berkat Rahmat dan Hidayah serta Inayah-Nya, penulis dengan segala keterbatasan dan kekurangan, berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “KONSEP ‘*ASHABIYAH* IBN KHALDUN DALAM PENGUATAN NILAI NASIONALISME DI INDONESIA” Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Siyash Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. sekalipun penulis sadari disana sini masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi, oleh karena itu besar harapan penulis adanya saran-saran atau masukan juga sebuah kritik konstruktif yang mendukung kelengkapan penulisan ini.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan kepada mereka yang selalu tetap konsisten dalam berjuang demi tegaknya agama Islam di bumi Allah ini sampai hari kiamat.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung selama perkuliahan berlangsung hingga penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada yang terhormat :

- Ayahanda penulis Ahmad Razali dan ibunda Sariah yang tanpa henti-hentinya terus mendoakan akan kehidupan yang baik kelak baik di dunia dan akhirat. Ya Allah, tiada yang saat ini bisa penulis lakukan, selain berdoa untuk mereka, dan bertekad agar mendapatkan kesempatan menyenangkan mereka di kehidupan dunia dan di hari kiamat kelak, *amin ya rabbal `alamin*.
- Bapak DR. Zulham, SHI., M.Hum selaku Dekan di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
- Ibu Fatimah.MA selaku Ketua Jurusan Siyasah di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
- Bapak Dr. Syafrudin Syam. M.Ag Selaku pembimbing I.
- Ibunda Syofiati Lubis. MH selaku pembimbing II.
- Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sumatera Utara, yang telah memberikan Ilmu dan wawasannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
- Ucapan terimakasih yang sangat mendalam kepada rekan-rekan Sahabat seperjuangan, senasib dan sepenanggungan yang begitu teramat sangat banyak pengorbanan mereka mulai dari tenaga pikiran dan lain sebagainya. Mereka adalah; Nurul Hidayah Rambe, Ihsan Kamil, Amran Brampu, Lukman Hakim, Deby Syahnaki, Mahmudin.

- dan semua teman-teman Program Studi Siyasa yang namanya tidak bisa disebut satu persatu.
- Selanjutnya ucapan terima kasih penulis khususkan buat Putri Ramadhona Rambe yang telah menyemangati dan memberikan dukungan penuh baik berupa materil atau ide ide kepada penulis.
- Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis khususkan buat Bapak Harun Rambe da Ibunda Sumaniar yang penulis anggap sebagai orang tua yang tidak bosan-bosannya memberikan nasehat kepada penulis utuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis serahkan seluruh jiwa dan raga, semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan oleh segenap pihak dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Semoga skiripsi yang jauh dari kesempurnaan ini menjadi setitik sumbangan bagi perkembangan Ilmu yang sungguh sangat luas ini, dan mudah-mudahan ini dicatat sebagai sebuah kebajikan yang melapangkan penulis masuk kedalam barisan orang-orang yang diridhoi-Nya. Amin

Hormat, dan salam Penulis

Medan,13 Oktober 2017
Wassalam,

SYAFRIZAL
Nim. 23123054

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Tinjauan Nilai Nasionalisme.....	19
1. Pengertian Nilai	19
2. Pengertian Nasionalisme.....	20
3. Nilai Nilai Nasionalisme	24

4. Bentuk Nasionalisme	27
5. Nasionalisme Di Indonesia.....	28
6. Perwujudan Nasionalisme.....	31
7. Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai Nasionalisme Di Indonesia.....	34
8. Nasionalisme Dalam Islam.....	36

BAB III TINJAUAN KONSEP ‘ASHABIYAH IBN KHALDUN.....41

A. Biografi Ibn Khaldun	41
1. Setting Sosial Ibn Khaldun.....	41
2. Fase Kehidupan Ibn Khaldun	45
3. Karya karya Ibn Khaldun	47
B. Pengertian ‘Ashabiyah	49
C. Latar Belakang Lahirnya Pemikiran ‘Ashabiyah	51
D. Peran ‘Ashabiyah Dalam Sosial Politik.....	56
1. ‘Ashabiyah dan Kekuasaan	57
2. ‘Ashabiyah Pondasi Kekuasaan dan Kedaulatan	59
E. Peranan ‘Ashabiyah Dalam Agama	60
F. Dalil Al-Qur’an dan Al-Hadits dalam Konsep ‘Ashabiyah.....	64

BAB IV ANALISIS NILAI NASIONALISME DALAM KONSEP

'ASHABIYAH IBN KHALDUN69

- A. Konsep '*Ashabiyah* Sebagai Dasar Pembentukan Negara dan Pemerintahan.....69
 - 1. Negara dan Pemimpin (Kepala Negara) 70
 - 2. Bentuk Bentuk Pemerintahan 74
- B. '*Ashabiyah*, Negara dan Nasionalisme Di Indonesia 76

BAB V PENUTUP86

- A. Kesimpulan86
- B. Saran.....89

DAFTAR PUSTAKA90

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibn Khaldun di anggap sebagai peletak dasar ilmu ilmu sosial. Namanya tidak hanya terkenal di dunia islam, tapi juga di kalangan non muslim. Ia adalah sejarawan, ahli politik, sosiolog, ahli fiqh, hakim, dan sederatan gelar lainnya yang layak di sandangkan padanya. Menurut catatan Syafii Maarif, sampai akhir tahun 1970-an saja tidak kurang dari 854 buku, artikel, review, disertasi, dan bentuk publikasi ilmiah lainnya yang di tulis oleh sarjana islam maupun barat tentang Ibn Khaldun. ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan sumbangan Ibn Khaldun dalam lapangan ilmiah. Selain itu, kenyataan ini menjadi bukti bahwa pemikiran ibn Khaldun sampai saat ini masih relevan dan msaih di kembangkan oleh berbagai kalangan pemikir, baik muslim maupun bukan.¹

Ibn Khaldun telah memberikan sumbangsih yang besar kepada dunia Islam atas karyanya yang berjudul *Muqaddimah*. Mungkin hal tersebut berangkat dari hubungan secara langsung terhadap berbagai kondisi dan

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: kencana. 2014), h. 41.

perkembangan politik yang beliau temui di berbagai tempat, serta analisisnya terhadap sejarah sebelumnya, ditambah lagi dalam pengamatannya menggunakan pendekatan sosiologis dan memberikan kontribusi baru bagi pengembangan keilmuan saat itu dan sesudahnya.

Pada awal pembahasannya dalam Muqaddimah, Ibn Khaldun menegaskan empat perbedaan mendasar antara manusia dan makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk yang berpikir, dengannya menghasilkan ilmu pengetahuan. Makhluk politik yang ingin mencari penghidupan dengan berbagai cara dan profesi, dan makhluk peradaban.

Ibn Khaldun menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah keharusan. Kodrat manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Ia membutuhkan orang lain untuk memenuhinya. Makanan yang ia makan saja sudah melibatkan sekian banyak proses dan tenaga manusia. Demikian juga dengan pakaian. Oleh karena itu, lanjut Ibn Khaldun, organisasi masyarakat merupakan keharusan bagi manusia. Tanpa ini eksistensi manusia tidak akan sempurna. Dari sinilah lahir sebuah peradaban. Ketika manusia telah mencapai organisasi kemasyarakatan dan peradaban, maka mereka membutuhkan seseorang yang akan melaksanakan

kewibawaan dan memelihara mereka dari permusuhan antara sesama mereka.

Ibn Khaldun juga melihat bahwa manusia memiliki watak yang suka menyerang antara satu dan lainnya. Karena itu, untuk menolak dan mencegah sikap sewenang wenang manusia atas manusia yang lain di perlukan pemimpin, ia adalah orang yang paling di segani di kelompoknya, sehingga dapat mengendalikan dan mengatur kehidupan manusia tersebut.

Dialah orang yang di sebut dengan raja atau kepala negara atau khalifah.²

Dia adalah orang yang akan melaksanakan kekuasaan dan menjauhkan manusia dari sifat agresifitas, arogansi, kezhaliman dan kebinatangan, masing-masing saling membunuh untuk memenuhi kepentingannya. Maka diperlukanlah sebuah lembaga untuk mengatur dan menertibkannya.³

Al-'Ashabiyah secara harfiah jika di terjemahkan kedalam bahasa indonesia berarti rasa satu kelompok atau solidaritas sosial.⁴ Secara etimologis *'Ashabiyah* berasal dari kata *'Ashaba* yang berarti mengikat. Secara fungsional *'Ashabiyah* menunjuk pada ikatan sosial budaya yang

² *Ibid*, h. 47-48

³Rusjdi Ali Muhammad. *Politik Islam: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 8

⁴ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, ajaran sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), h.104.

dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, 'Ashabiyah juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok.⁵

'Ashabiyah juga merupakan landasan tegaknya negara. Bila 'Ashabiyah itu kuat, maka negara yang muncul akan luas, sebaliknya bila 'Ashabiyah lemah, maka luas negara relatif terbatas.⁶

Dalam kaitannya dengan 'Ashabiyah, Ibn Khaldun menilai bahwa seorang raja haruslah berasal dari solidaritas kelompok yang paling dominan. Sebab dalam mengendalikan sebuah negara, menjaga ketertiban, serta melindungi negara dari ancaman musuh baik dari luar maupun dalam dia membutuhkan dukungan, loyalitas yang besar dari rakyatnya. Hal ini hanya bisa terjadi jika ia berasal dari kelompok yang dominan. Karena kekuasaan politik yang tidak di dukung oleh kelompok yang kuat maka akan dapat di pastikan akan mengalami distorsi dan guncangan.⁷ Sebagaimana Ibn Khaldun menuliskan di dalam kitab muqaddimah

⁵ Jhon L. Esposito (ed). *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, Jilid I, (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), h. 198

⁶ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*. Penerjemah Masturi Irham, dkk (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001), h.viii

⁷ *Ibid*, h. 53

في أن الملك والدول " العامة " إنما تحصل بالقبيل والعصبية

“Kerajaan dan pemerintahan secara umum dapat berdiri dengan dukungan kabilah dan solidaritas sosial.”⁸

Bagi Ibn Khaldun, agama juga termasuk faktor penting yang dapat mempersatukan berbagai perbedaan di dalam masyarakat. Agama harus digandengkan dengan solidaritas kelompok, sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi kekuasaan politik. Sebaliknya, bila agama dan semangat solidaritas kelompok yang besar sekalipun ini di pertentangkan, maka yang terjadi adalah disintegrasi dan menjadi bumerang bagi manusia. Jadi, kalau solidaritas kelompok merupakan perintis bagi eksistensi bagi suatu negara, maka agama akan menjadi penopang kekuasaan (negara) tersebut.⁹

Seperti halnya bangsa arab. menurut Ibn Khaldun, persamaan ketuhananlah yang membuat mereka berhasil mendirikan dinasti. Sebab menurutnya, bangsa arab adalah bangsa yang paling tidak mau tunduk satu sama lain, kasar, angkuh, ambisius dan masing masing ingin menjadi pemimpin. ‘*Ashabiyah* yang ada hanya ‘*Ashabiyah* kesukuan/kabilah yang tidak memungkinkan mendirikan sebuah dinasti karena sifat mereka. Hanya

⁸ Abd Al Rahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 193

⁹ *Ibid.*, h. 50

karena agama yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW mereka akhirnya bisa di persatukan dan bisa di kendalikan.

Saat ini konsep '*Ashabiyah*' kurang begitu dikenal dalam suatu negara karena tergantikan dengan konsep nasionalisme. Kedua konsep ini merupakan bagian dari politik bernegara yang terkadang diidentikan atau dibedakan sama sekali karena memiliki persamaan dan perbedaan. Secara umum nasionalisme adalah sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada kegiatan bangsa atas nama sebuah bangsa. Maka, nasionalisme erat kaitannya dengan konsep *nation* dan *isme* yang dinamakan paham kebangsaan.

Sejak awal abad ke-20 Republik Indonesia sebagai sebuah bangsa sesungguhnya sudah merintiskan diri sebagai sebuah negara. Kebangkitan nasional menjadi salah satu titik penting sebagai langkah awal mencapai kemerdekaan. Berikutnya, Sumpah Pemuda adalah momen penting yang menyatukan beragam perbedaan. Hingga akhirnya, 17 Agustus 1945 menjadi titik puncak perjuangan Bangsa Indonesia. Sudah lebih dari 70 tahun bangsa Indonesia menikmati kemerdekaan, tentunya tidak lepas dari perjuangan panjang para pahlawan pejuang kemerdekaan. Semangat juang

dan nasionalisme mereka yang telah membakar dan menimbulkan hasrat untuk kemerdekaan. Nasionalisme membangun kesadaran rakyat sebagai suatu bangsa serta memberi seperangkat dan program tindakan. Sebagai generasi penerus yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya untuk mengisi kemerdekaan ini dan salah satunya dengan pembangunan nasional. Nasionalisme dapat dijadikan sebagai dasar pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Paham Nasionalisme merupakan sebuah kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama seluruh bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonialisme.

Nasionalisme merupakan perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Kondisi nasionalisme suatu bangsa akan terpancar dari kualitas dan ketangguhan bangsa tersebut dalam menghadapi berbagai ancaman. Dengan Nasionalisme yang tinggi, kekhawatiran akan terjadinya ancaman terhadap keutuhan dan kesatuan

¹⁰ <http://lib.unnes.ac.id/20002/1/3401408006.pdf> (di akses pada tanggal 18 April 2017)

bangsa akan dapat dielakkan. Dari Nasionalisme akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. nasionalisme Indonesia juga bisa di lihat sebagai suatu ikatan budaya yang menyatukan dan mengikat masyarakat prulal Indonesia menjadi suatu bangsa. Nasionalisme Indonesia menggambarkan ikatan budaya yang menyatukan dan juga mengikat rakyat Indonesia yang majemuk menjadi suatu bangsa dalam ikatan suatu Negara-bangsa (*nation-state*).¹¹

Namun, sebagaimana sekalipun di yakini oleh sebagian kalangan, bangunan Negara-bangsa Indonesia kini belum tergoyahkan, dalam arti nasionalisme masih hidup. Akan tetapi, belakangan ini substansinya dalam praktik demokrasi dan penerapan hukum secara konsekuen dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara mulai kehilangan arah. Kondisi nasionalisme yang semakin melemah selain di akibatkan faktor komitmen warga, khususnya penyelenggara Negara, juga karena faktor dominasi ekonomi pasar dari globalisasi, dan desentralisasi/otonomi komunitas lokal/daerah.

¹¹ Thung Ju Lan dan Azzam Manan, *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press,2011) h, 4.

Dengan demikian tidaklah mudah mempertahankan dan menjaga keutuhan negara yang majemuk dan sangat luas. Di samping membutuhkan seorang pemimpin yang hebat dan tangguh juga dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk tetap menggalang persatuan dan kesatuan. Kemajemukan yang ada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia sering kali menimbulkan berbagai masalah dalam lapisan masyarakat. seperti banyaknya tindakan anarkis yang sering terjadi, banyak konflik antar ras, suku dan agama. Ini semua mengakibatkan berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa indonesia.

Dari pemaparan di atas Penulis menjadi tertarik untuk meneliti sejauh mana ide dan nilai nilai nasionalisme yang ada dalam konsep '*Ashabiyah* Ibn Khaldun. Dan sejauh mana relevansinya konsep '*Ashabiyah* Ibn Kahldun terhadap negara Indonesia. Dan mampukah konsep '*Ashabiyah* dari pemikiran Ibn Khaldun menjadi solusi atas tantangan sudah melemahnya nilai nasionalisme di Indonesia. atas dasar pemikiran inilah membuat penulis tertarik untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif dalam penelitian skripsi dengan judul **"KONSEP '*ASHABIYAH* IBN**

KHALDUN DALAM PENGUATAN NILAI NASIONALISME DI INDONESIA”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep '*Ashabiyah* Menurut Ibn Khaldun.
2. Bagaimana relevansi konsep '*Ashabiyah* Ibn Khaldun dalam konsep Nasionalisme di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep '*Ashabiyah* sebagai sebuah konsep yang relevan untuk diterapkan di negara modern.
2. Untuk mengetahui nilai Nasionalisme di Indonesia dalam konsep '*Ashabiyah*.

3. Untuk mengetahui konsep '*Ashabiyah* sebagai suatu sistem alternatif dan solusi dalam melemahnya nilai nasionalisme kebangsaan di Indonesia.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat kesarjanaan Program Studi Siyasa.
2. Menambah wacana ilmu pengetahuan dan penelitian dalam konsep '*Ashabiyah* Ibn Khaldun dalam tinjauan konsep Nasionalisme di Indonesia untuk diteruskan dalam penelitian lainnya yang relevan.
3. Memberikan pemahaman/informasi terhadap masyarakat dunia bahwa konsep '*Ashabiyah* dapat diterima sebagai sebuah konsep yang masih relevan untuk diterapkan hingga saat ini.

D. Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian dengan bahasan konsep '*Ashabiyah* Ibn Khaldun tentang kehidupan bernegara dalam tinjauan ketatanegara Islam ataupun ketatanegaraan modern telah dilakukan, baik yang mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum yang sejalan dengan bahasan penelitian.

Berikut ini merupakan paparan tinjauan umum atas sebagian karya-karya penelitian tersebut:

Skripsi, Supatmi, *Konsep 'Ashabiyah dalam pengangkatan kepala negara* (2006). Di dalam skripsi ini, Supatmi lebih memfokuskan penelitiannya terhadap bagaimana pengangkatan kepala negara dalam perspektif konsep 'Ashabiyah Ibn Khaldun. Penulis melihat tidak adanya pembahasan yang mendekati tentang bagaimana konsep Nasionalisme kebangsaan di Indonesia dalam konsep 'Ashabiyah Ibnu Khaldun.

Skripsi, Endang Sri Wahyuni, *Kebangkitan dan keruntuhan suatu negara menurut Ibnu Khaldun* (2007). Dalam salah satu babnya menguraikan tahapan terbentuknya negara serta keruntuhannya. Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang ingin penulis teliti adalah terletak pada penulis lebih memfokuskan pada konsep nasionalisme dan menghubungkannya dengan konsep 'Ashabiyah Ibnu Khaldun.

Oleh karena absennya pembahasan konsep 'Ashabiyah yang hubungannya dengan Konsep Nasionalisme di Indonesia, utamanya dalam hal negara dan pemerintahan, maka sangatlah relevan dan signifikan jika

penulis melakukan analisis konsep Nasionalisme di Indonesia dalam konsep 'Ashabiyah Ibn Khaldun yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi.

E. Metode Penelitian

Sekarang mendefinisikan penelitian sebagai suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.¹²

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian analitis deskriptif. Artinya metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara obyektif materi yang akan dibahas. Metode analitis digunakan untuk mendapat dan mengetahui relevansi dari nilai Nasionalisme di Indonesia yang ada dalam konsep 'Ashabiyah Ibn Khaldun.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian ini lebih menuntut kejelasan peneliti serta sangat menekankan terhadap aspek analisa dan kajian teks, terutama dalam mencari informasi dan data yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian.

¹² J.R Jaco. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta:Grasindo), h. 5.

2. Pendekatan Penelitian.

Mengingat obyek penelitian ini menyangkut kajian sejarah dan pemikiran, maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan historis yaitu sebuah pendekatan dengan kajian masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.¹³

3. Sumber Data.

Penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam mengumpulkan data, yakni sumber primer dan kedua sumber sekunder.¹⁴

Adapun rincian masing masing sumber adalah:

- a. Data Primer disandarkan pada literatur klasik *Muqaddimah* Ibn Khaldun yang secara akademis telah dipandang otoritatif.
- b. Data Sekunder merupakan sumber pendukung dari sumber primer yang berasal dari kepustakaan, buku-buku maupun data-data tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet.XVI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h, 73.

¹⁴ *Ibid.*, h.74.

4. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini di dasarkan pada riset pustaka (*Library Research*) yakni proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data dan informasi diperoleh berdasarkan bahan-bahan yang ada di perpustakaan, baik berupa arsip, dokumen, majalah maupun lainnya.¹⁵

5. Metode Analisis Data.

Analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, terutama dalam tahap ini, seorang peneliti telah memasuki tahap penetapan hasil temuannya. Oleh sebab itu, dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan pokok-pokok permasalahan secara menyeluruh dan komparatif yaitu sebuah metode perbandingan dengan cara menganalisa data-data yang ada, kemudian penulis kombinasikan untuk menghasilkan sebuah pemikiran yang padu.

¹⁵ Consuelo G Sevilla (dkk), *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet.I, (Jakarta: UI Pres, 1993), h. 37.

6. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatra Utara tahun 2015.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini di bagi atas (5) lima bab bahasan, dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini memaparkan berbagai teori dari sumber literatur yang penulis anggap memiliki keterkaitan dan relevan dengan masalah yang dikaji yaitu mengenai teori tentang Konsep Nasionalisme secara umum. Defenisi Nasionalisme, sejarah perkembangan Nasionalisme di Indonesia, dan hal hal yang berkaitan dengan Konsep Nasionalisme di Indonesia.

BAB III : Pada bab ini penulis akan memaparkan konsep '*Ashabiyah* Ibn Khaldun, yang terdiri dari, biografi dan setting sosial Ibn Khaldun,

Latar belakang lahirnya pemikiran *'Ashabiyah*. Peran *'Ashabiyah* dalam sosial politik terdiri dari, *'Ashabiyah* dan kekuasaan, *'Ashabiyah* sebagai fondasi kekuasaan dan kedaulatan. Peranan *'Ashabiyah* dalam negara, dan *ashabiyah* menopang Agama (syariat).

BAB IV : Pada bab ini Berisikan analisis dari relevansi pemikiran Ibn Khaldun yang mengulas tentang pengaruh pemikiran konsep *'Ashabiyah* Ibn Khaldun terhadap Konsep Nasionalisme dan pengaruhnya di indonesia.

BAB V : Sebagai penutup bagi keseluruhan rangkaian pembahasan sebelumnya, menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dapat penulis ambil dan saran-saran relevan yang dapat penulis kemukakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Nilai Nasionalisme

1. Pengertian Nilai

Menurut Winarno Nilai adalah hal yang bersifat abstrak, artinya nilai tidak dapat ditangkap melalui indra. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Misalnya nilai keadilan, kesederhanaan. Orang hidup mengharapkan mendapat keadilan. Kemakmuran adalah keinginan setiap orang. Jadi, nilai bersifat normatif, suatu keharusan yang menuntut diwujudkan dalam tingkah laku.¹⁶

Sejalan dengan itu Sajarkawi mengungkapkan bahwa nilai merupakan kualitas suatu hal yang dapat menjadikan suatu hal dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai serta dapat menjadi objek kepentingan. Nilai merupakan suatu yang tidak hanya diyakini melainkan suatu yang menjiwai tindakan seseorang. Nilai seseorang selalu diukur melalui tindakan yang telah dilakukannya. Nilai-nilai ini merupakan bagian kenyataan yang tidak dapat dipisahkan atau diabaikan. Setiap orang melakukan tindakan haruslah

¹⁶ Winarno. *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai Lokal* (Bandung: Pustaka Setia. 2010) h, 3

sesuai dengan seperangkat nilai-nilai baik nilai yang telah tertulis di masyarakat maupun belum.¹⁷

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasanya nilai adalah hal yang bersifat abstrak yang tidak dapat ditangkap melalui indra dan merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Jadi pada dasarnya nilai tidak dapat dilihat maupun dirasakan oleh indra manusia. Apabila suatu objek memiliki sifat atau kualitas yang baik maka dapat dikatakan objek itu bernilai positif. Pada dasarnya Nilai merupakan suatu yang tidak hanya diyakini melainkan suatu yang menjiwai tindakan seseorang. Nilai seseorang selalu diukur melalui tindakan yang telah dilakukannya, sehingga segala tindakan seseorang haruslah didasari dengan nilai-nilai yang sesuai dan telah berlaku di masyarakat.

2. Pengertian Nasionalisme.

Nasionalisme adalah; pertama, paham (ajaran) untuk mencintai Bangsa dan Negara sendiri, sifat kenasionalan; kedua, kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau actual bersama

¹⁷ Sjarkawi. *Pembentukan Kepribadian Melalui Peningkatan Pertimbangan Moral* .(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan) h. 29

mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, semangat kebangsaan.¹⁸

nasionalisme berasal dari bahasa latin *nation* yang berarti bangsa yang dipersatukan. Menurut Sunarso nasionalisme adalah sikap nasional untuk mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa dan sekaligus menghormati bangsa lain. Istilah nasionalisme pertama kali digunakan di Jerman pada abad ke-15 oleh mahasiswa yang datang dari daerah etimologis yang sama atau berbahasa sama. Kata tersebut untuk menunjukkan perasaan cinta mereka terhadap bangsa/suku asal mereka. Dengan demikian, penggunaan istilah nasionalisme adalah sebagai representasi perasaan cinta seseorang terhadap bangsa, bahasa dan daerah asal mereka.¹⁹

Penggunaan istilah nasionalisme dalam perkembangannya mengalami perubahan, dimana sejak revolusi Perancis meletus 1789. Sejak saat itu, istilah nasionalisme menjadi label perjuangan di negara-negara Asia-Afrika yang dijajah bangsa Barat. Keragamann makna itu dapat dilihat dari sejumlah pendapat berikut. Smith memaknai nasionalisme sebagai suatu

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h, 601.

¹⁹ Sunarso, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan PKN Untuk Perguruan Tinggi*. (Yogyakarta: UNY Press. 2008) h, 36.

gerakan ideologis untuk meraih dan memelihara otonomi, kesatuan dan identitas bagi satu kelompok sosial tertentu yang diakui oleh beberapa anggotanya untuk membentuk suatu bangsa yang sesungguhnya atau bangsa yang potensial.²⁰

Sementara itu, Anderson memahami nasionalisme sebagai komunitas khayalan (*imagined community*) yang disatukan oleh sebuah persahabatan yang mendalam di mana anggota-anggotanya diyakini menciptakan sebuah kesatuan yang utuh dan kuat. Sedangkan menurut Rukiyati nasionalisme adalah perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Karena kuatnya rasa yang dimiliki maka timbullah rasa cinta bangsa dan tanah air.²¹

Berdasarkan uraian di atas, nasionalisme dalam sejarahnya digunakan untuk beberapa hal antara lain: Untuk mewakili perasaan rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa atau budaya yang sama, maka dalam hal ini nasionalisme sama dengan patriotisme.

²⁰ D Anthony Smith, *Nasionalisme Teori Ideologi Sejarah*. (Jakarta:Erlangga, 2012), h, 11.

²¹ Rukiyati, dkk. *Pendidikan Pancasila*,(Yogyakarta: UNY Press, 2008), h. 69.

Dalam konteks nasionalisme Indonesia, Anderson mengatakan bahwa nasionalisme dalam pengertian tradisional masih sangat dibutuhkan. Saat ini terdapat sinyalemen yang menunjukkan bahwa ada kecenderungan terkikisnya nasionalisme atau semakin berkurangnya semangat nasional, lebih-lebih di kalangan mereka yang kaya dan berpendidikan. Anderson menganjurkan untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalis sebagaimana yang dulu hidup secara nyata di kalangan para pejuang pergerakan dan revolusi. Ia mengusulkan dibinanya semangat “nasionalisme kerakyatan” yang sifatnya bukan elitis melainkan memihak ke masyarakat luas, khususnya rakyat yang lemah dan terpinggirkan. Salah satu ciri pokok dari nasionalisme kerakyatan itu adalah semakin kuatnya rasa kebersamaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa.²²

Kemunculan dan pertumbuhan proto-nasionalisme, dalam banyak hal, merupakan konsekuensi dari perubahan-perubahan cepat dan berdampak luas yang berlangsung di Indonesia dan banyak negara lain umumnya pada dekade-dekade awal abad 20. Menurut Sunarso juga mengatakan nasionalisme bagi bangsa Indonesia merupakan suatu paham

²²Anderson Benedict, *Imagined Communities (Komunitas-komunitas Terbayang)*. (Yogyakarta: INSIST dan Pustaka Pelajar. 2008) h, 14.

yang menyatukan pelbagai suku bangsa dan pelbagai keturunan bangsa asing dalam wadah kesatuan negara Republik Indonesia.

Jadi pada intinya nasionalisme dapat diartikan sebagai sikap untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan bangsa, sehingga akan muncul perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Dalam paradigma baru tentang nasionalisme, nasionalisme harus diartikan sebagai bentuk orientasi pemikiran bangsa yang memberikan wawasan dan bimbingan bangsa untuk secara terus menerus mencapai kemajuan dan keberhasilan dalam berbagai bidang kebanggaan dan kehormatan bangsa. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai suatu orientasi pemikiran yang dapat dipakai untuk mempertahankan serta menanggulangi segala tantangan dan kesulitan yang dihadapi bangsa pada saat ini atau masa yang akan datang.

3. Nilai Nilai Nasionalisme.

Nilai adalah segala sesuatu yang disenangi atau diinginkan, dicita-citakan dan di sepakati yang dianggap sangat penting dan berharga. Dengan demikian nilai-nilai nasionalisme Indonesia adalah nilai-nilai yang bersumber pada semangat kebangsaan Indonesia yang diharapkan dapat menjadi

standar perilaku warga negara negara Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Ki Supriyoko, nilai yang terkandung dalam nasionalisme Indonesia seperti persatuan dan kesatuan, perasaan senasib, toleransi, kekeluargaan, tanggung jawab, sopan santun dan gotong royong.

Nilai-nilai nasionalisme adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Rela Berkorban. merupakan aturan jiwa atau semangat bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar.
- b. Nilai Persatuan dan Kesatuan. Nilai ini mencakup pengertian disatukannya beraneka corak yang bermacam-macam menjadi suatu kebulatan. Bermacam agama, suku bangsa yang dipeluk dan bahasa yang dipergunakan mudah memberi kesempatan timbulnya kekerasan. Kekerasan ini ditiadakan bilamana semua pihak mempunyai rasa persatuan dan kesatuan yang tebal. Dengan demikian semboyan negara kita yang berbunyi “Bhinika Tunggal Ika” benar-benar dapat dipakai pedoman segenap bangsa Indonesia untuk berinteraksi dan mampu mengayomi dari seluruh wilayah Indonesia.

- c. Nilai Harga Menghargai. Sebagai Bangsa yang berbudaya, bangsa Indonesia sejak lama telah menjalin hubungan dengan bangsa lain atas dasar semangat harga menghargai. Jalinan persahabatan dengan bangsa merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.
- d. Nilai Kerjasama. merupakan aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari suka bekerja sama atas dasar semangat kekeluargaan. Pancaran dari semangat kerjasama ini adalah bangsa Indonesia telah terbiasa menghadapi suatu persoalan terlebih dahulu dibicarakan bersama dan dikerjakan bersama. Nilai kerjasama ini masih tetap diperlukan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
- e. Nilai Bangga Menjadi Bangsa Indonesia. Nilai ini sangat diperlukan dalam melestarikan negara Republik Indonesia, perasaan bangga ini harus tumbuh secara wajar dan jangan dipaksakan. Sejarah perjuangan sangat menunjukkan bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang jaya dan tinggi. Tetapi karena penjajahan itu menjadi bangsa yang menderita dan kekurangan. Pengalaman yang diperoleh

sejarah ini harus menjadi cambuk bangsa Indonesia untuk bekerja lebih keras agar dapat keluar dari suasana serba kekurangan.²³

Dari berbagai pendapat yang terdapat pada pengertian nilai dan pengertian nasionalisme, dapat dikaji bahwasanya nilai nasionalisme yakni rasa cinta terhadap tanah air serta sikap untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan bangsa, sehingga akan muncul perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat.

4. Bentuk Nasionalisme.

Beberapa bentuk nasionalisme dan gerakannya yang terjadi di Indonesia adalah:

- a. Nasionalisme Kemandirian bangsa, di mana semangat bernegara di bangun untuk mewujudkan kejayaan bangsanya, contoh: Zaman Sriwijaya, Majapahit dan Samudera Pasai.
- b. Nasionalisme Agama, yaitu gerakan yang berupaya memperoleh kemerdekaan melalui semangat keagamaan, contoh: upaya yang dipelopori oleh Serikat Islam (SI) sejak tahun 1911, dalam melawan kolonialisme Belanda.

²³ Ki Supriyoko, *Menggugat Nilai-Nilai Nasionalisme*. (Diakses dari journal.amikom.ac.id. Pada tanggal 22 Agustus 2017).

- c. Nasionalisme Sekuler, gerakan yang berupaya memperoleh kemerdekaan dengan tidak menyebutkan agama sebagai Inspirasi gerakan, walaupun tidak menentang adanya peran agama dalam kegiatan politik, contoh: gerakan yang dilakukan oleh Soekarno tahun 1927, melalui Partai Nasional Indonesia.
- d. Nasionalisme Anti Agama (komunis), sebenarnya ciri nasionalisme ini lebih mengarah pada Internasionalisme, berbeda dengan bentuk gerakan kedua yang menjadikan agama sebagai spirit gerakannya, nasionalisme anti agama tidak memberikan peran agama bahkan agama tidak berperan dalam gerakan dan harus dijauhi.²⁴

5. Nasionalisme Di Indonesia.

Di Indonesia nasionalisme juga tercermin dari ideologi bangsa yang dimiliki yakni Pancasila. Menurut Arif Rohman mengemukakan ideologi Pancasila memiliki lima prinsip nilai yang bersifat dasar (*staat fundamental norms*) yang merupakan ajaran dasar yang dipedomani oleh seluruh warga bangsa baik dalam tataran individu maupun kelompok. Kelima nilai dasar itu adalah sebagai berikut.:

²⁴ Budiyono, Kabul. 2007. *Nilai-Nilai Kepribadian dan Kejuangan Bangsa Indonesia*. (Bandung: Alfabeta,2007) h, 209-210

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan keyakinan pada Tuhan. Pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari misalnya saling menghormati, memberi kesempatan dan kebebasan menjalankan ibadah, serta tidak memaksakan atau kepercayaan pada orang lain. Melalui pelaksanaan sila yang pertama ini bangsa Indonesia menghendaki ketuhanan dan kebersamaan dengan cara saling menghormati.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab bangsa Indonesia mengakui, menghargai dan memberikan hak dan kebebasannya yang sama pada tiap warganya, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus tetap menghormati hak-hak orang lain untuk menjaga toleransi.

c. Persatuan Indonesia.

Pada sila persatuan Indonesia bangsa Indonesia lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Pelaksanaannya dalam kehidupan dengan cara mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan golongan, suku, atau individu. Sila yang ketiga ini

menegaskan komitmen dan pendirian warga negara untuk mengutamakan, memperhatikan dan menjaga keutuhan bangsa dan negara.

- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Pada sila yang keempat bangsa Indonesia mengakui untuk mengambil keputusan yang menyangkut orang banyak dilaksanakan dengan cara musawarah mufakat. Pelaksanaan musawarah mufakat ini untuk menghargai perbedaan pendapat.

- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada sila yang kelima bangsa Indonesia mengakui dan menghargai warganya untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan hasil usahanya,

tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh merugikan orang lain.²⁵

Rukiyati, dkk menjabarkan pokok-pokok pikiran yang perlu dipahami dalam sila ketiga, yaitu:

²⁵ Arif Rohman. *Politik Ideologi Pendidikan*. (Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2009), h, 42.

- 1) Nasionalisme.
- 2) Cinta bangsa dan tanah air.
- 3) Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.
- 4) Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.
- 5) Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.²⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Semangat nasionalisme bangsa Indonesia dituangkan dalam Pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, agama, adat istiadat dan kepercayaan yang berbeda-beda tetapi tetap satu sebagai bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang bersemboyan “Bhineka Tunggal Ika”.

6. Perwujudan Nasionalisme.

Perwujudan nasionalisme disesuaikan dengan keadaan atau kondisi suatu negara, artinya nasionalisme pada zaman dahulu, sekarang dan yang akan datang tentunya akan berbeda. Ketika pada masa penjajahan

²⁶ Rukiyati, dkk. *Pendidikan Pancasila*, h. 69.

perwujudannya adalah berupa perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan dan mendirikan negara sekaligus menentang penjajahan. Berbeda halnya ketika ketika negara ini sudah berdiri, karena sudah merasa bersatu, perwujudan nasionalisme adalah dengan mengisi dan mempertahankan kemerdekaan negara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nasionalisme bangsa Indonesia merupakan jiwa kebangsaan yang memang mutlak harus ada mengingat bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, berbagai agama, berbagai kebudayaan maupun bahasa. Perwujudan nasionalisme ada dua hal, yang keduanya merupakan rangkaian peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia, baik masa jaya maupun masa derita:

a. Kenangan Masa Lampau dalam hidup berbangsa.

Proses berbangsa yang merupakan kenangan masa lampau dengan menganjurkan jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena dalam sejarah terkandung kenangan masa lampau dalam hidup berbangsa. Baik kenangan kejayaan bersama di masa kencana kerajaan-kerajaan besar maupun penderitaan bersama di kala di bawah penjajahan asing. Keduanya merupakan pembentukan dalam berbangsa yang akhirnya menjadi dasar pembentukan dalam bernegara. Sebagaimana perwujudan nasionalisme di

hari sumpah pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda dalam Kongres pelopor persatuan bangsa Indonesia dalam kongres Pemuda di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928.

b. Kehendak untuk Bersatu dalam hidup bernegara.

Proses bernegara merupakan kehendak untuk bersatu dalam persyarikatan hidup bersama. Kehendak untuk bersatu adalah syarat mutlak adanya negara kesatuan Republik Indonesia, apa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda, dalam taraf keinginan bangsa Indonesia, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk negara proklamasi.

Bangsa Indonesia adalah bangsa kesatuan dari berbagai suku bangsa dengan Bhineka Tunggal Ika, dan negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷

Jadi perwujudan nasionalisme bangsa Indonesia tercermin dalam rangkaian peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa lampau. Selain itu, perwujudan rasa nasionalisme juga tumbuh dalam jiwa seseorang, yaitu dengan loyalitas, kecintaan dan penghormatan kepada negara. Pembinaan nasionalisme secara tepat dan efektif mutlak diperlukan agar

²⁷ Noor Bakry, *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h, 132.

supaya nyala nasionalisme tetap berkobar di dalam jiwa para generasi muda bangsa Indonesia yang hidup jauh setelah perjuangan kemerdekaan berlalu.

7. Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai Nasionalisme Di Indonesia.

Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif.²⁸

a. Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme.

- 1) Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat.
- 2) Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.

²⁸Siswono Yudohusodo, dkk. *Nasionalisme Indonesia Dalam Era Globalisasi*. (Yogyakarta: Yayasan Widya Patria, 1994). h. 35

3) Dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan Iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa.

b. Pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme.

1) Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang.

2) Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri (seperti Mc Donald, Coca Cola, Pizza Hut,dll.) membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia.

- 3) Masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat.
- 4) Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa.
- 5) Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa ²⁹

8. Nasionalisme Dalam Islam.

Hubungan antara agama dan Negara dalam Islam, telah diberikan teladannya oleh Nabi S.A.W. sendiri setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah. Dari nama yang dipilih oleh Nabi S.A.W. bagi kota hijrahnya itu menunjukkan rencana Nabi dalam rangka mengemban misi sucinya dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi yang kemudian

²⁹ <http://www.wikimu.com>, (di akses pada tanggal 21 Agustus 2017)

menghasilkan suatu entitas sosial politik, yaitu sebuah Negara Negara madinah pimpinan Nabi itu.

Menurut Muhammad Arkoun, Eksperimen Madinah itu telah menyajikan kepada umat manusia contoh tatanan sosial-politik yang mengenal pendelegasian wewenang (artinya, wewenang atau kekuasaan tidak memusat pada tangan satu orang seperti pada sistem diktatorial, melainkan kepada orang banyak melalui musyawarah) dan kehidupan berkonstitusi (artinya, sumber wewenang dan kekuasaan tidak pada keinginan dan keputusan lisan pribadi, tetapi pada suatu document tertulis yang prinsip prinsipnya di sepakati bersama). Karena ide pokok eksperimen wujud historis terpenting dari sistem sosial-politik eksperimen madinah itu ialah document yang termashur yaitu *Mitsaqal Madinah* (Piagam Madinah), yang di kalangan para sarjana modern juga menjadi sangat terkenal sebagai “Konstitusi Madinah”.

Ide pokok eksperimen madinah oleh nabi ialah adanya suatu tatanan sosial politik yang di perintah tidak oleh kemauan pribadi, melainkan secara bersama-sama, tidak oleh prinsip-prinsip *ad hoc* yang dapat berubah-ubah sejalan dengan kehendak pemimpin, melainkan oleh prinsip-prinsip yang

dilembagakan dalam dokumen kesepakatan dasar semua anggota masyarakat, yaitu sebuah konstitusi.³⁰

Dilihat dari dimensi kesejarahan, Nasionalisme selalu dikaitkan dengan lahirnya Piagam Madinah yang oleh para ahli politik Islam dianggap sebagai cikal bakal terbentuknya Negara nasional (nation-state) dan menempatkan Nabi Muhammad S.A.W, tidak sekedar sebagai pemimpin agama tapi juga pemimpin Negara. Oleh karena itu, secara umum Nasionalisme terkait dengan teks piagam Madinah. Alasannya pada waktu itu Madinah tidak hanya di huni oleh umat Islam, atau komunitas yang menolong Nabi yang dikenal dengan kaum anshar, bukan pula yang di tuhuni oleh sahabat Nabi yang berasal dari mekkah yang disebut kaum muhajirin. Akan tetapi Madinah juga di huni dari golongan lain dan juga umat dari agama lain, seperti Yahudi, Nasrani dan bahkan mereka yang masih menyembah berhala (*musyrikin*), serta mereka yang memiliki kepercayaan lainnya, seperti kaum penyembah api (*majusi*). Mereka ini (penduduk Madinah) disatukan oleh Nabi bukan dengan memakai sentimen

³⁰ Nurcholish Madjid, "Agama dan Negara Dalam Islam; Telaah atas Fiqh Siyasah Sunni," <http://media.isnet.org/Islam/Paramadina/Konteks/Agama-NegaraN1.html>, akses 21 Agustus 2017.

agama. Akan tetapi, mereka disatukan dengan sentimen kepemilikan bersama, yakni bagaimana mempertahankan Madinah dari segenap ancaman yang datang dari luar, baik berupa serangan atau ancaman apapun.³¹

Sebagai Negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, perbincangan tentang hubungan antara Islam dan Nasionalisme dalam konteks Indonesia sama tuanya dengan usia kemerdekaan itu sendiri. Perbincangan yang sudah dimulai sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Sebagian komunitas muslim menilai tidak ada pertentangan antara Islam dan Nasionalisme. Namun tidak sedikit pula yang menilai bahwa Islam dan Nasionalisme tidak dapat berdampingan sebagai ideologi dan keyakinan. Dalam menjelaskan hubungan antara Islam dan Nasionalisme, Hasan al-Banna, seorang tokoh pergerakan Islam, memaparkan bahwa apabila yang dimaksud dengan Nasionalisme adalah kerinduan atau keberpihakan terhadap tanah air, keharusan berjuang membebaskan tanah air dari penjajahan, ikatan kekeluargaan antar masyarakat, dan pembebasan negeri-negeri lain maka Nasionalisme dalam

³¹ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, cet ke-1, (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 241-242

makna demikian dapat diterima dan bahkan dalam kondisi tertentu dianggap sebagai kewajiban.³²

³² “Sejarah Nasionalisme dan Perspektif Islam”, imdadr@gmail.com di akses pada tanggal 22 Agustus 2017

BAB III

TINJAUAN KONSEP ‘ASHABIYAH IBN KHALDUN

A. Biografi Ibn Khaldun

1. Setting Sosial Ibn Khaldun

Ibn Khaldun bernama lengkap Waliudin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Khaldun al-Hadrami, lahir di Tunisia, 1 Ramadhan 732 H/ 27 Mei 1332 M. Ia berasal dari Hadramaut (Yaman), dan silsilahnya sampai kepada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Walibin Hujr dari Kabilah Kindah. Cucu Wali bernama Khalid bin Usman memasuki daerah Andalusia pada abad ke-3 H. Anak cucu Khalid bin Usman ini kelak membentuk keluarga bani Khaldun, asal nama Ibn Khaldun. Bani Khaldun ini tumbuh dan berkembang di kota Qarmunah (Carmona) di Andalusia (Spanyol), selanjutnya hijrah ke Isybilia (Sevilla), tempat banyak anak cucu Bani Khaldun menduduki jabatan penting dalam pemerintahan.

Pada masa kecilnya di Tunisia, ia belajar berbagai cabang ilmu pengetahuan, seperti mantik, filsafat, fiqih, dan sejarah. Ia juga menghafal al-Qur'an serta mempelajari ilmu bahasa dan tajwid. Guru pertamanya adalah

ayahnya sendiri, dan selanjutnya ulama Andalusia yang karena kemelut di Andalusia hijrah ke Tunisia, bersamaan dengan naiknya Abu al-Hasan, pemimpin Bani Marin (1347). Studinya terhenti ketika tiba-tiba sebagian belahan dunia timur terjangkit wabah pes, pada 797 H/ 1348 M, sehingga banyak tokoh politik dan ulama yang hijrah ke Andalusia.³³

Ibn Khaldun menghabiskan lebih dari dua pertiga umurnya di kawasan Afrika Barat laut, yang sekarang ini berdiri negara-negara Tunisia, Aljazair dan Maroko serta Andalusia yang terletak di ujung selatan Spanyol. Pada zaman ini kawasan tersebut tidak pernah menikmati sebuah stabilitas dan ketenangan politik, sebaliknya merupakan kancah perebutan dan kekuasaan antar dinasti dan juga pemberontakan sehingga kawasan itu atau sebagian darinya sering berpindah tangan dari satu dinasti ke dinasti yang lain. Kenyataan tersebut sangat mewarnai hidup dan karir Ibn Khaldun.³⁴

Ibn Khaldun meniti karirnya dibidang pemerintahan dan politik dikawasan Afrika Barat dan Andalusia selama hampir seperempat abad. Dalam kurun waktu itu lebih dari sepuluh kali dia berpindah jabatan dan

³³Rahman Zainuddin, *Ilmu Sejarah, Sosial dan Politik, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Cet.II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 274.

³⁴Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta :Universitas Indonesia Press, 1993), h. 90-91.

seringkali bergeser loyalitas dari satu dinasti ke dinasti yang lain dan dari satu pengusaha ke pengusaha yang lain pada dinasti yang sama.³⁵ Pada usia 21 tahun (751 H/ 1350M), ia diangkat sebagai sekretaris Sultan al-Fadl dari dinasti Hafsi, tetapi ia kemudian berhenti karena penguasa ini kalah perang (753 H/1352 M), dan Ibn Khaldun pun terdampar di kota Baskara, Maghribi Tengah (Aljazair). Disini ia berusaha bertemu dengan Abu Anan dari Bani Marin, dan pada tahun 755 H/1354 M ia diangkat menjadi anggota majelis ilmu pengetahuan, dan kemudian menjadi sekretaris sultan. Jabatan ini di pegangnya sampai tahun 763 H/1361 M dengan dua kali sempat dipenjara sampai saat *wazir* Usman bin Abdullah marah kepadanya dan memerintahkannya untuk meninggalkan Tunisia. Ia pun pergi ke Granada pada tahun 764 H/ 1363 M tempat sultan Bani Ahmar memerintah.

Ketika hubungannya dengan sultan mengalami keretakan, ia berpindah haluan kepada Abu Abdillah Muhammad, pemimpin Bani Hafsi yang kemudian mengangkatnya sebagai perdana menteri merangkap khatib negara, sampai Bijayah jatuh tangan Sultan Abu al-Abbas Ahmad.³⁶ Pada

³⁵*Ibid.*, h. 91-92.

³⁶Zainuddin, *Ilmu Sejarah*, h. 274.

masa ini, Ibn Khaldun di angkat lagi sebagai perdana menteri, sampai ia pergi ke Baskarah. Di Baskarah ini ia berkirim surat untuk memberikan dukungan kepada sultan Tilmisan dari Bani Abdil Wad, Abu Hammu. Sultan memberikan jabatan penting di dalam kesultanannya, tetapi ditolak oleh Ibn Khaldun. Dan mengusulkan kakaknya yang bernama Yahya untuk menjadi pengganti posisinya. Namun demikian, Ibn Khaldun tetap membantunya mengumpulkan beberapa suku untuk memihak kepada Abu Hammu melawan Abu Abbas.³⁷

Setelah mengabdikan kepada pemerintah yang satu dengan yang lain, Ibn Khaldun merasa lelah dalam petualangan politiknya. Ketika Abu Hamu memintanya untuk mencari dukungan politik dari para suku lebih banyak, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan politik.³⁸ Sekalipun usahanya tidak pernah lelah namun dia gagal membawa perdamaian diantara negara-negara kecil di Afrika dan memutuskan untuk mengasingkan

³⁷Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan Pemikiran Islam*, Penerjemah Ahmad Thaha (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1989), h. 22.

³⁸Hakimul Ikhwan Afandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 29.

diri di Oran, pinggiran kota Tunisia, disinilah selama empat tahun dia mencurahkan dirinya untuk meneliti sejarah dan menulis Muqaddimah.³⁹

Pada tahun 780 H/1378 M, Ibn Khaldun kembali ke tanah airnya Tunisia, disana ia merevisi kitab *al-Ibar*-nya. Kemudian pada tahun 784 H/1382 M ia berangkat ke Iskandariyah, Mesir, untuk menghindari kekacauan politik di Maghribi, kemudian ia pergi ke Kairo. Di Kairo Ibn Khaldun mengambil jalur didunia pendidikan, selain sebagai seorang hakim di pengadilan. Disini ia sangat disukai karena penjelasannya yang mengesankan mengenai berbagai fenomenasosial. Ibn Khaldun wafat pada tahun 808 H/1406 M, tak lama setelah ditunjuk keenam kalinya sebagai hakim, dan dimakamkan dikawasan pemakaman orangsufi di Kairo (Mesir).⁴⁰

2. Fase kehidupan Ibn Khaldun

Zainab Khudhairi mengklasifikasi perjalanan hidup Ibn Khaldun dalam empat fase perkembangan yaitu fase studi, fase politik praktis, fase pemikiran dan kontemplasi, dan fase bergerak di bidang pengajaran dan

³⁹Zainab al-Khudairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*. Penerjemah Ahmad Rafi' (Bandung: Pustaka, 1987), h. 15.

⁴⁰*Ibid.*, h. 31.

peradilan.⁴¹ Sementara Toto Suharto mengklasifikasikan menjadi tiga fase yaitu fase pendidikan, fase aktivitas politik praktis serta fase aktivitas akademisi dan kehakiman. Menurut penulis, perbedaan klasifikasi ini terletak pada perbedaan sudut pandang aktivitas kontemplasi Ibn Khaldun ketika menghasilkan karya-karyanya di Qal'at Bani Salamah.⁴² Khudhairi mengelompokkannya sebagai fase kontemplasi dan pemikiran sedangkan Toto Suharto membahas masa ini pada fase politik praktis. Bagi penulis, hal ini tidak menjadi masalah karena pada intinya tetap sama hanya sudut pandang dalam mengklasifikasikannya saja yang berbeda. Pada konteks ini, penulis sependapat dengan Khudhairi dalam mengklasifikasi fase kehidupan Ibn Khaldun yakni:

- a. Fase pertama adalah fase studi. Masa ini berjalan sampai Ibn Khaldun berusia 20 tahun yaitu sejak 732 H (1332 M)-752 H (1350 M) yang dilalui di Tunis.

⁴¹ *Ibid.*, h. 20

⁴² Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun* (Jakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), h. 36.

- b. Fase kedua adalah fase berkecimpung dibidang politik. Fase ini dilalui setelah ia berusia lebih dari 20 tahun yaitu 752 H (1350 M)-776 H (1374 M).
- c. Fase ketiga adalah fase pemikiran dan kontemplasi di benteng Ibn Salamah milik Bani 'Arif. Fase ini berlangsung selama empat tahun yakni 776 H-780 H (1374 -1378 M).
- d. Fase keempat adalah fase bergerak dibidang pengajaran dan peradilan berlangsung sejak 780 H (1378 M)-806 H (1404 M) dan meninggal di Mesir (1406 M). pada fase ini, ia menyelesaikan dan merivisi seluruh karyanya *al-Ta'rif*, *al Muqaddimah* dan *al Ibar*.

3. Karya Karya Ibn Khaldun

Meskipun Ibnu Khaldun hidup pada masa peradaban Islam mulai mengalami kehancuran atau menurut Nurkholish Madjid, pada saat umat Islam telah mengalami anti klimaks perkembangan peradabannya, namun ia mampu tampil sebagai pemikir muslim yang kreatif yang melahirkan pemikiran-pemikiran besar yang dituangkan dalam beberapa karyanya, hampir seluruhnya bersifat orisinal.

Berikut ini beberapa karya Ibnu Khaldun yang cukup terkenal, antara lain:

- a. Kitab *al-I'bar wa Dhuan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa man 'Asharhiim min Dzawi al-Suthan al-Akbar*. Karya yang dilihat dari judulnya mempunyai gaya sajak yang tinggi ini dapat diterjemahkan menjadi; Kitab contoh-contoh dan rekaman tentang asal-usul dan peristiwa hari-hari arab, Persia, Barbar dan orang-orang yang sezaman dengan mereka yang memiliki kekuatan besar. Oleh karena judulnya terlalu panjang, orang sering menyebutnya dengan kitab *al- 'Ibar* saja, atau kadang cukup dengan sebutan Tarikh Ibnu Khaldun.
- b. Kitab *Muqaddimah* Ibnu Khaldun Dalam volume tujuh jilid, kajian yang dikandung begitu luas menyangkut masalah-maslah sosial, para Khaldunian cenderung menganggapnya sebagai ensiklopedia.
- c. Kitab *al-Ta 'rif Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Garban wa Syarqan*. Adalah kitab otobiografi Ibnu Khaldun secara lengkap di mana ia dipandang sebagai orang besar abad pertengahan yang paling sempurna meninggalkan riwayat hidupnya.

d. Karya-karya lain.

Selain karya yang telah disebutkan di atas, Ibnu Khaldun sebenarnya memiliki karya-karya lainnya seperti; *Burdah al-Bushairi*, tentang logika dan aritmatika dan beberapa resume ilmu fiqih. Sementara itu masih ada dua karya Ibnu Khaldun yang masih sempat dilestarikan yaitu sebuah ikhtisar yang ditulis Ibnu Khaldun dengan tangannya sendiri ini diberi judul *Lubab al-Muhashal fi Ushul al-Din*. Dan kitab *Syifa al-Sailfi Tahdzib al-Masatt* yang ditulis Ibnu Khaldun ketika berada di Fez, adalah karya pertama yang berbicara tentang teologi skolastik dan karya kedua membahas tentang mistisisme konvensional.⁴³

B. Pengertian ‘Ashabiyah

‘*Ashabiyah* secara etimologis berasal dari kata “*ashabah*” yang berarti mengikat kesukuan atau kelompok solidaritas untuk menghadapi pihak luar.⁴⁴

⁴³ <http://warungempog.blogspot.co.id/2013/10/karya-karya-ibnu-haldun.html> (Di akses pada tanggal 25 agustus 2017).

⁴⁴ Cyril Glase, *Ensiklopedi Islam (ringkas)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 117.

Secara terminologis, menurut Oesman Raliby (Cendekiawan Muslim Indonesia) mengartikan ‘*Ashabiyah* dengan rasa golongan, Muhsin Mahdi (sejahrawan dan pengamat politik Islam) mengartikannya sebagai *social Solidarity* (solidaritas sosial), Frans Roshental (Orientalis/sejahrawan) menerjemahkannya menjadi *group feeling* (perasaan golongan), Charles Issawi (orientalis), mengalih bahasakannya dengan *solidarity* (solidaritas) dan Philip K.Hitti (orientalis) mengartikannya sebagai *tribal spirit* (semangat kesukuan) atau *the spirit of the clan* (semangat suku atau kaum).⁴⁵

Menurut Abd. al-Raziq al-Makki, dalam karyanya *al-Fikr al-Falsafi ‘inda Ibn Khaldun*, kata ‘*Ashabiyah* erat kaitannya dengan kata ‘*ashab* yang berarti hubungan dan kata ‘*ishabah* yang berarti ikatan. Awalnya kata ‘*Ashabiyah* berarti ikatan mental, yang menghubungkan orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Ini sesuai dengan perkataan orang Arab yang menyebut keluarga dengan kata ‘*ashabah*.⁴⁶

Penulis menerjemahkan ‘*Ashabiyah* dengan keluarga, kelompok para sahabat, semangat ras kelompok, patriotisme, nasionalisme, semangat

⁴⁵ *Ibid*, h.176.

⁴⁶ <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/11489/1/MUHAMMAD%20TAUFIK-FSH.pdf> (di Akses pada tanggal 17 September 2017)

nasional, dan partai. Namun dalam pembahasan ini penulis memaknai '*Ashabiyah* dengan Nasionalisme.

C. Latar Belakang Lahirnya Pemikiran '*Ashabiyah*.

'*Ashabiyah* tidak ada kecuali dikalangan orang-orang desa, sementara bagi kalangan orang-orang kota kadar '*Ashabiyah* telah berkurang, sekalipun solidaritas sosial masih kita temukan di kota. Mengapa demikian? Karena kehidupan kota telah melemahkan '*Ashabiyah*, akibat terbuai dengan kemewahan dan kelezatan hidup. Sementara di desa dengan kesederhanaannya ia akan tetap memelihara kekuatan '*Ashabiyah*, dengan demikian syarat pertama adalah adanya struktur kesukuan.⁴⁷

'*Ashabiyah* itu sendiri ialah kemampuan seseorang untuk membela dan mempertahankan keluarganya serta orang-orang yang tergabung di dalamnya dengan sekuat mungkin. Keluarga yang dimaksud adalah orang yang berasal dari garis keturunan ayahnya, sebab mereka inilah yang akan membela Klannya. '*Ashabiyah* dalam pengertian demikian adalah terpuji. Sedangkan '*Ashabiyah* yang tidak terpuji adalah '*Ashabiyah* atau solidaritas orang-orang sesuku untuk melawan suku-suku yang lain tanpa landasan

⁴⁷ Zainab al-Khudairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*. Penerjemah Ahmad Rafi' (Bandung: Pustaka, 1995), h. 147.

agama, terlepas orang-orang tersebut termasuk penindas atau yang tertindas. yakni seseorang membenci seseorang yang lain karena orang tersebut masuk dalam suku X atau suku Y. Perbuatan seperti ini sangat diharamkan, sejalan dengan ini Nabi SAW bersabda: “*Barang siapa yang menyeru pada ‘Ashabiyah tidak termasuk kita*”. Oleh karena itu perbuatan ini tidak dibenarkan dan persaksian pelakunya tidak dapat diterima.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ‘*Ashabiyah* yang baik adalah ‘*Ashabiyah* yang meliputi satu keluarga dengan perasaan solidaritas yang berlandaskan agama. Atau dengan kata lain agamalah yang menjadi motivasi satu-satunya yang mendorong suatu suku memerangi suku lainnya.⁴⁸ Ini disebabkan karena hubungan darah memiliki kekuatan yang mengikat pada manusia setiap ummat manusia, yang membuat mereka ikut merasakan akan setiap penderitaan yang menimpa kaumnya.

Sudah merupakan kodrat setiap manusia untuk membenci penindasan dan menolak penderitaan yang mungkin menimpa kaumnya. Adanya hubungan kekeluargaan antara dua orang yang saling bantu membantu, lebih disebabkan karena adanya hubungan *nashab* (ikatan

⁴⁸ *Ibid*, h. 142.

darah), dan inilah bentuk *'Ashabiyah* yang sesungguhnya. Apabila tingkat kekeluargaan itu jauh maka ikatan darah akan sedikit melemah, maka sebagai gantinya timbullah perasaan kefamilian yang didasarkan pada pengetahuan yang lebih luas tentang persaudaraan. Sungguhpun demikian, setiap orang ingin membantu orang lain (famili) sebab ia khawatir akan kehinaan yang mungkin timbul apabila ia gagal dalam kewajibannya melindungi seseorang yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa ia ada hubungan keluarga dengannya.

Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Pelajarilah silsilah keturunanmu untuk mengetahui siapa saudaramu sedarah yang dekat*”, yang berarti bahwa persaudaraan hanyalah berarti apabila pertalian darah itu membawa pada kerjasama yang sebenarnya dan bantu membantu pada saat kesusahan. Kenyataannya ialah bahwa hubungan yang demikian itu lebih bersifat emosional dan tidak memiliki realitas. Dalam arti bahwa hubungan itu hanya berguna untuk mendekatkan hati dan kecintaan orang. Apabila persaudaraan terlihat nyata, maka ia akan berguna sebagai pendorong yang wajar kearah *'Ashabiyah*. Jika *'Ashabiyah* didasarkan pada sekedar pengetahuan tentang keturunan dari nenek moyang yang sama, maka ia akan lemah dan

mempunyai pengaruh yang rendah terhadap perasaan, oleh karena itu 'Ashabiyah hanya mempunyai sedikit dampak yang nyata.⁴⁹

Dengan demikian 'Ashabiyah menurut Ibn Khaldun tidak hanya meliputi satu keluarga saja, yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh tali kekeluargaan, tetapi juga meliputi hubungan yang timbul akibat terjadinya persekutuan. Dalam *muqaddimah* Ibn Khaldun dijelaskan bahwa 'Ashabiyah juga meliputi hubungan yang timbul akibat perbudakan dan penyewaan tentara, sedangkan kegunaan silsilah kekeluargaan adalah yang ditimbulkannya.⁵⁰

Perbedaan hal ikhwal penduduk adalah akibat dari perbedaan cara mereka memperoleh penghidupan. Mereka hidup bermasyarakat tidak lain hanyalah untuk saling membantu dalam memperoleh penghidupan, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana sebelum mereka mencari kehidupan yang lebih tinggi.⁵¹

Di antara mereka ada yang hidup bertani, ada pula yang hidup beternak untuk dikembangkan biakkan atau diambil hasilnya. Kehidupan mereka

⁴⁹ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*. Penerjemah Ahmadi Thaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), h. 152.

⁵⁰ Khudairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, h. 143.

⁵¹ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*. Penerjemah Ahmadi Thaha, h. 114.

bermasyarakat dan saling membantu didalam memenuhi kebutuhan hidup dan peradaban, seperti makanan, perlindungan, dan panas, mereka tidak gentar untuk memperolehnya lebih dari batas kebutuhan guna melangsungkan kehidupan menurut batas kebutuhan hidup. Tak lebih dari itu, sebab mereka tidak mampu memperoleh lebih. Kemudian, apabila kondisi mereka semakin nyaman dan memperoleh kekayaan dan kemewahan diatas batas yang dibutuhkan, mereka hidup tenang. Dengan demikian mereka akan saling bantu membantu dalam memperoleh sesuatu diatas batas kebutuhan. Mereka mempergunakan banyak makanan, pakaian, dan berbangga diri dengan itu semua. Selanjutnya mereka pun membangun rumah-rumah besar dan mempercantik kota untuk tempat berlindung. Inilah yang melatar belakangi lahirnya pemikiran Ibn Khaldun tentang '*Ashabiyah*, sebagaimana yang diuraikan diatas- rasa solidaritas atau saling tolong menolong terhadap sesama untuk tujuan-tujuan bersama.

D. Peran '*Ashabiyah* Dalam Sosial Politik.

'Ashabiyah merupakan kekuatan politik yang mendorong pembentukan negara atau dinasti. '*Ashabiyah* mensyaratkan adanya pemimpin, yakni seorang tokoh yang mendapat dukungan dari keluarganya

dan pengikutnya. *'Ashabiyah* merupakan kekuatan politik yang mendorong pembentukan negara atau dinasti. *'Ashabiyah* mensyaratkan adanya pemimpin, yakni seorang tokoh yang mendapat dukungan dari keluarga dan pengikutnya. Dalam konsep *'Ashabiyah* tidak semua orang bisa menjadi pemimpin, sebab pimpinan diperoleh dengan kemenangan, oleh karena itu *'Ashabiyah* pimpinan harus lebih kuat daripada *'Ashabiyah ashabiyah* lain agar kemenangan tersebut dapat terwujud.⁵²

Menurut Ibn Khaldun kepemimpinan bukan merupakan kekuasaan "*de jure*" tetapi merupakan kekuasaan "*de facto*" dan kepemimpinan diperoleh dengan kemenangan, yakni dengan penggunaan kekuatan. Dengan demikian kepemimpinan terpusatkan pada salah satu cabang *'Ashabiyah* yang paling kuat.⁵³

1. *'Ashabiyah* dan Kekuasaan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai *'Ashabiyah* adalah kekuasaan. Menurut Ibn Khaldun mengenai hal ini: "Bahwa kemenangan terdapat di pihak yang mempunyai solidaritas yang lebih kuat, dan anggota-anggotanya

⁵² Ibn Khaldun, *Muqaddimah*. Penerjemah Ahmadie Thaha, h. 114.

⁵³ Khudairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, h. 153.

lebih sanggup berjuang dan bersedia mati guna kepentingan bersama.”

Kedudukan sebagai raja adalah suatu kedudukan yang terhormat dan diperebutkan, karena kedudukan memberikan kepada pemegangnya segala kekayaan duniawi dan juga kepuasan lahir batin. Karena itulah kekuasaan menjadi sasaran perebutan dan jarang sekali di lepaskan dengan suka rela kecuali dibawah paksaan. Perebutan menimbulkan perjuangan dan peperangan dan runtuhnya singgasana-singgasana. Semuanya itu tidaklah dapat terjadi kecuali dengan ‘*Ashabiyah* atau solidaritas sosial.⁵⁴

Tetapi bila kekuasaan telah berdiri teguh dan mereka yang dikuasai telah pula terbiasa dengan kekuasaan yang ada, maka menurut Ibn Khaldun, alat-alat kekuasaan kurang memegang peranan, termasuk ‘*Ashabiyah*, seperti yang terdapat pada waktu menegakkan kekuasaan semula. Dalam keadaan demikian penguasa dan orang-orang yang telah membantunya menegakkan kekuasaan itu mulai melihat kepada hal-hal lain yang dirasakan menarik, terutama pada kemewahan yang datang tanpa dicapai. Karena pada dasarnya, dan menjadi tabiatnya pula bahwa kekuasaan itu di iringi dengan kemewahan. Tetapi kemewahan ini hanya mula-mula saja akan menambah

⁵⁴Ibn Khaldun, *Muqaddimah*. Penerjemah Ahmadi Thaha, h. 122.

kekuatan penguasa, namun akhirnya kekuatan ini akan melemah karena kemewahan itu mengandung sifat yang merusakkan manusia, yaitu pada akhlaknya. Ia akan melupakan seseorang tentang kewajiban kewajibannya yang sesuai dan harus dipenuhi sebagai seorang penguasa. Ini akan melemahkan *'Ashabiyah* tadi, dan dalam keadaan demikian seorang penguasa akan mendasarkan kekuasaannya pada serdadu upahan atau tentara bayaran. Bila ini terjadi sekurang-kurangnya untuk sementara perkembangan akan menuju kepada pemusatan kekuasaan dan kekerasan untuk memaksakan kehendak oleh golongan yang mula-mula menegakkan *daulah*. Pemusatan kekuasaan itu tidak dibenarkan, *'Ashabiyah* pada awalnya akan menyuruh orang untuk kemenangan dan kemegahan yang diperoleh secara bersama-sama. Bila timbul juga pemusatan kekuasaan, maka rasa golongan itu akan hancur.⁵⁵

2. *'Ashabiyah* Fondasi Kekuasaan dan Kedaulatan.

'Ashabiyah adalah kekuatan penggerak negara dan merupakan landasan tegaknya suatu negara atau dinasti. *'Ashabiyah* juga merupakan kekuatan pemersatu dan mampu melindungi kelompok dan mempercepat

⁵⁵ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negara Barat* (Jakarta: Mizan, 2000), h. 72.

kemenangan kelompok itu atas '*Ashabiyah*-'*Ashabiyah* lainnya serta sebagai peredam pertentangan-pertentangan dalam tubuh sendiri. Lebih jauh lagi '*Ashabiyah* selalu membuat terjadinya perubahan yang mengakibatkan terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Dan '*Ashabiyah* juga merupakan struktur sosio-politik yang membuat terjadinya peralihan dari masyarakat tanpa kelas menjadi masyarakat berkelas. Pada permulaannya aristokrasi kesukuan didasarkan pada struktur sosio-politik yang berlandaskan persamaan. Dan setiap kali aristokrasi itu semakin kuat ia akan semakin tampak sebagai suatu kelas yang kepentingannya bertentangan dengan kepentingan anggota-anggota suku lain, akibatnya goncanglah struktur kesukuan yang pada dasarnya di dasarkan pada persamaan. Namun kegoncangan ini pada batas tertentu dapat di pandang progresif, sebab ia merupakan permulaan peralihan menuju sistem produksi yang lebih efektif.

Ashabiyah juga mempunyai peran yang besar perluasan negara setelah sebelumnya ia merupakan landasan tegaknya negara tersebut. Jadi bilamana '*Ashabiyah* itu kuat maka negara yang muncul pun akan luas pula. Sebaliknya jika '*Ashabiyah* itu lemah maka luas negara yang muncul relatif terbatas. Menurut Ibn Khaldun mengenai hal ini: "kekuasaan akan muncul

bersama-sama *'Ashabiyah* dan anggota-anggota *'Ashabiyah* adalah pelindung yang akan terpenjar di seluruh penjuru negara. Jadi apabila *'Ashabiyah* tersebut kuat maka negara tersebut akan lebih kuat dan luas.⁵⁶

E. Peranan *'Ashabiyah* Dalam Agama

Dalam kehidupan manusia, agama mempunyai pengaruh yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana agama mengontrol diri manusia, sehingga mereka dengan mudah tunduk, patuh dan berkumpul (membentuk kesatuan sosial). Agama dapat melenyapkan sifat kasar dan bangga diri, serta melatih untuk menghilangkan perasaan iri dan cemburu. Agama yang dimaksud Ibn Khaldun pada pembahasan ini mempunyai pengertian *al-Din*, yang erat kaitannya dengan syariat. Ini juga mempunyai konotasi hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT.

Penyebaran agama pada mulanya memberi kepada dinasti kekuatan lain disamping solidaritas sosial yang dimiliki sebagai cermin dari jumlah penyokongnya. Ini disebabkan karena corak agama yang menghilangkan rasa saling cemburu dan iri yang terjadi, sehingga dengan pertolongan Allah bisa

⁵⁶ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*. Penerjemah Ahmadie Thaha, h.142

dihadirkan rasa kebersamaan dan mewujudkan pada konsentrasi kebenaran.

Ibn Khaldun mengutip sebuah ayat yang berbunyi:

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ

بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: Dan yang mempersatukan hati mereka walaupun kamu membelanjakan semua yang ada di bumi, niscaya kamu tidak akan dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Anfal: 63).

Jadi, persatuan itu bukan merupakan hasil usaha atau rekayasa manusia, tetapi taufiq atau perkenaan dari Allah. Dalam hubungan antara ‘*Ashabiyah* dan agama, menurut Ibn Khaldun terdapat dampak timbal balik di antara keduanya. Dalam sebuah pasal dengan judul “Agama memperkokoh kekuatan ‘*Ashabiyah* yang telah dipupuk negara dan jumlah penduduknya”. Ia berkata sebagai berikut: “semangat agama dapat meredakan pertentangan dan iri hati yang dirasakan oleh satu anggota dari kelompok itu terhadap anggota lainnya dan menuntun mereka kearah

kebenaran. Perhatian mereka telah terpusat pada kebenaran maka tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi mereka. Sebab pandangan mereka adalah sama dan tujuan yang mereka kejar pun serupa dan satu untuk mereka, dan mereka bersedia berjuang sampai mati.”⁵⁷

Agama mempersatukan bahasa, fikiran, tujuan kehidupan mereka. Dengan adanya unsur agama ini, seluruh perhatian ditumpukkan kepada kebenaran saja.⁵⁸ Dari ucapan Ibn Khaldun di atas dapat disimpulkan bahwa ‘*Ashabiyah*’ menopang agama. Dan sebagian suku-suku semisal suku arab, tidak akan meraih kekuasaan kecuali atas dasar agama. Sebab ‘*Ashabiyah*’ mereka yang diwarnai kebiadaban, keliaran, dan kebebasan itu saja tidak cukup. Ibn Khaldun dalam sebuah pasal *al-Muqaddimah* dengan judul: Bangsa Arab tidak mampu mendirikan suatu kerajaan kecuali atas dasar agama, seperti wahyu seorang nabi atau ajaran seorang wali. Sebabnya ialah karena tabiatnya yang keras, sombong, kasar dan iri hati satu sama lainnya, terutama dalam persoalan-persoalan politik. Semua itu menyebabkan mereka

⁵⁷ *Ibid.* h.138

⁵⁸ A.R. Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibn Khaldun* (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1992), h.165

menjadi manusia yang sukar diatur, karena keinginan keinginannya sukar sekali terpenuhi.⁵⁹

Tetapi bila mereka memeluk agama yang dibawa seorang nabi atau wali, mereka memiliki prinsip-prinsip batin untuk menguasai hawa nafsu, dan kesombongan sehingga iri hati mereka dapat ditahan, dengan demikian mudahlah menyatukan dan membimbing mereka. Sebab agama meniadakan kekasaran dan kesombongan dan meredakan iri hati dan persaingan.⁶⁰

Menurut Ibn Khaldun, selain *'Ashabiyah*, yang menjadi faktor pendukung bagi tegaknya suatu negara adalah agama (syariat Islam). Karena kekuasaan dan wibawa politis yang sesuai dengan syariat akan mencegah timbulnya keburukan-keburukan serta kejahatan-kejahatan yang mudah muncul bersamaan dengan adanya kekuasaan, misalnya perbuatan sewenang-wenang, ketidakadilan, dan keinginan bermandikan kesenangan lepas dari kepatutan.⁶¹

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa agama dapat mengikat hati manusia menjadi satu, sehingga dapat mewujudkan segala sesuatu yang

⁵⁹Khudairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, h.159

⁶⁰Ibn Khaldun, *Muqaddimah*. Penerjemah Ahmadi Thaha, h.132

⁶¹ *Ibid*, h. 74

dikehendaki oleh ummat atau masyarakat, termasuk untuk mendirikan sebuah negara ataupun dalam menciptakan ketentraman dan kedamaian dan untuk melindungi masyarakat atau ummat dari serangan-serangan yang datang dari luar.⁶²

F. Dalil al-Qur'an dan al-Hadits dalam Konsep 'Ashabiyah Ibn Khaldun

Berikut dalil dan sekaligus landasan pemikiran Ibn Khaldun mengenai negara dan pemerintahan serta hubungannya dengan warga negara yang tertuang dalam konsep '*Ashabiyah*:

1. Al-Qur'an

a. Pemberian kedaulatan

...والله يؤتي ملكه من يشاء...

Artinya: "Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki"(QS. Al-Baqarah: 247)⁶³

b. Taat kepada pemimpin atau ulil amri.

يا ايها الذين ءامنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم...

⁶² Noer, *Pemikiran Politik di Negara Barat*, h.77

⁶³ Di kutip dari, *Muqaddimah* Ibn Khaldun. Penerjemah Ahmadie Thaha, h. 190

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...(QS.An-Nisa: 59)⁶⁴

c. Persamaan (kesetaraan status sebagai manusia).

ياايهاالناس إن خلقناكم من ذكر وأنتى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير.

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seoranglaki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.(QS. Al-Hujurat: 13)⁶⁵

2. Al-Hadits

a. Pemimpin keturunan Quraysi (dirasionalisasikan oleh Ibn Khaldun)

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن علي ابن الاسد قال : حدثني

بكير بن وهب الجزرى قال : قال لي أنس بن مالك : احدثك حديثا ما

⁶⁴ *Ibid.*, h. 238

⁶⁵ *Ibid.*, h. 248

أحدثه آل أحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام علي باب البيت ونحن فيه فقال :

الائمة من قريش، ان لهم عليكم حقا، ولكم عليهم حقا مثل ذلك ما ان استرحموا

فرحموا، وان عاهدوا وفوا، وان حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله،

والملائكة، والناس اجمعين). رواه احمد

Artinya: “ Abdullah bercerita kepada saya, Abi Sanaa Muhammad bin Ja’far Sanaa keturunan Ali bin al-Asad berkata: Bakir bin Wahab al-Jazuri berkata:Anas bin Malik berkata kepada saya, akan saya ceritakan kepadamu suatu Hadits yang membahas tentang kepemimpinan. Sesungguhnya Rasulullah SAW waktu itu berdiri di depan pintu dan kita ada disampingnya, kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Pemimpin dari suku Quraysi itu bisa benar menurut kita dan para pemimpin kita bisa benar menurut mereka, dengan syarat jika ada yang meminta kasih sayang (pertolongan) maka sayangilah, jika kalian berjanji maka tepatilah dan jika kalian menghukum maka kalian harus bersifat adil. Barang siapa yang tidak melaksanakan

perkara tersebut maka Allah, Malaikat dan semua manusia akan melaknat pemimpin tersebut.(HR. Ahmad)⁶⁶

b. Nabi diutus mendapat dukungan kaumnya.

وما بعث الله نبيا بعده الا في منعة من قومه). رواه احمد

Artinya: “Allah tidak mengutus seorang Nabi kecuali bilamana ia mendapatdukungan dari kaumnya”. (HR. Ahmad)⁶⁷

c. Mencegah Kemungkaran

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك

أضعف الإيمان). رواه مسلم

Artinya: “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran (hal yang keji,buruk), maka hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman”. (HR. Muslim)

⁶⁶ Di kutip dari, Oesman Raliby, *Ibn Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang,1978) Cet. Ke-4. h 117

⁶⁷ Di kutip dari Zainuddin, *Kekuasaan*. h. 165

BAB IV

ANALISIS NILAI NASIONALISME DALAM KONSEP '*ASHABIYAH*

IBN KHALDUN

A. Konsep '*Ashabiyah* Sebagai Dasar Pembentukan Negara Dan Pemerintahan

Konsep '*Ashabiyah* mempunyai peran penting dalam mencegah konflik dan ketidakadilan dan untuk menjaga kebersamaan masyarakat, hal ini karena kapasitas individu yang tidak memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasarnya atau bahkan mempertahankan diri.

Umat manusia secara alamiah adalah kelompok sosial dan cenderung untuk hidup bersama. Manusia sangat memerlukan bantuan dan kerjasama dengan yang lain, tetapi manusia tidak dapat hidup bersama dan bekerjasama dalam suasana konflik, permusuhan (*udwan*) dan ketidakadilan (*zhalim*). Hal-hal tersebut akan membuat kehidupan sosial tidak mungkin dapat diwujudkan. Untuk itulah diperlukan '*Ashabiyah* (*group feeling*) dan *wazi* (kekuatan pengendalian atau pemerintah).⁶⁸

⁶⁸ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*. Penerjemah Ahmadie Thaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), h. 166.

'*Ashabiyah* adalah rasa solidaritas sosial yang di dalamnya terdapat suku-suku atau kelompok yang bekerjasama untuk kepentingan bersama. Akan tetapi rasa solidaritas sosial tersebut akan hancur bilamana suatu suku atau kelompok tersebut terpecah belah atau tidak mau lagi bekerjasama. Karena alasan inilah, persekutuan suatu kelompok atau suku memerlukan hadirnya seorang penguasa atau raja yang mampu menangkal agresi. Kebutuhan akan adanya seseorang yang mempunyai otoritas dan bisa mengendalikan ini kemudian meningkat. Didukung dengan rasa kebersamaan yang terbentuk bahwa seorang pemimpin (*rais*) dalam mengatur dan menjadi penengah tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan tentara yang kuat dan loyal, perdana menteri, serta pembantu-pembantu yang lain hingga terbentuklah sebuah dinasti (*daulah*) atau kerajaan (*mulk*).⁶⁹

1. Negara dan Pemimpin (Kepala Negara)

Defenisi Umum negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya

⁶⁹ *Ibid.*, h. 139.

ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Ibn Khaldun memulai pembicaraan mengenai negara berdasarkan pada kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang hidup berkelompok dan saling memerlukan bantuan. Hal ini dilakukan manusia untuk bisa bertahan hidup dan untuk mendapatkan rasa aman. Oleh karenanya diperlukan kerjasama antara sesama manusia. Kerjasama tersebut membentuk suatu organisasi kemasyarakatan.⁷⁰ Dari sinilah Ibn Khaldun mengatakan bahwa organisasi kemasyarakatan (*al-ijma' al-insani*) adalah merupakan keharusan. Karenanya, peradaban umat manusia itu tidak lepas dari organisasi masyarakat tersebut.⁷¹

Setelah organisasi kemasyarakatan terbentuk dan peradaban merupakan suatu kenyataan di dunia ini, maka masyarakat membutuhkan seseorang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah antara anggota masyarakat. Menurutnya, peran sebagai penengah dan pemisah hanya dapat dilakukan oleh seseorang dari anggota masyarakat

⁷⁰ *Ibid.*, h. 41.

⁷¹Hakimul Ikhwan Afandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 89.

itu sendiri. Seseorang tersebut harus berpengaruh kuat atas anggota-anggota masyarakat, harus mempunyai kekuasaan dan otoritas atas mereka sehingga tidak seorangpun di antara anggota masyarakat dapat mengganggu atau menyerang sesama anggota masyarakat yang lain. Tokoh yang mempunyai kekuasaan, otoritas dan wibawa tersebut adalah raja, khalifah atau kepala negara.⁷²

Untuk bertindak sebagai raja, haruslah memiliki '*Ashabiyah* (solidaritas sosial) yang kuat. Ibn Khaldun menilai bahwa seorang raja haruslah berasal dari solidaritas kelompok yang paling dominan. Sebab dalam mengendalikan sebuah negara, menjaga ketertiban, serta melindungi negara dari ancaman musuh baik dari dalam ataupun luar dia membutuhkan dukungan loyalitas yang besar dari rakyatnya. Oleh karenanya, dari berbagai '*Ashabiyah* atau solidaritas kelompok yang terdapat di negara itu, kepala negara atau raja harus berasal dari solidaritas kelompok yang dominan.⁷³

Tetapi seorang raja, dengan segala atribut yang di milikinya mungkin juga memerintah secara tidak adil, lebih mengikuti kehendak dan hawa

⁷² Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h.92.

⁷³ *Ibid.*, h. 105.

nafsunya sendiri, dan tidak memperhatikan kepentingan dan kemampuan rakyat, sehingga menyebabkan rakyat sukar menaatinya, dengan akibat timbulnya penindasan, teror dan anarki. Oleh karena itu kebijaksanaan pemerintahan raja serta hubungan antara raja dan rakyat harus didasarkan atas peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik tertentu, yang harus ditaati oleh semua pihak yang bersangkutan. Peraturan-peraturan tersebut dapat merupakan hasil dari rekayasa para cendekiawan, pemuka dan cerdik pandai negara itu, tetapi dapat pula bersumberkan ajaran agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi-Nya.⁷⁴

Ibn Khaldun menekankan bahwa syariat tidak membatasi atau mengekang ataupun melarang kekuasaan politik itu, melainkan memberikan batasan syar'i saja, tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya keburukan-keburukan serta kejahatan-kejahatan yang mudah berbarengan muncul dengan adanya kekuasaan, misalnya perbuatan sewenang-wenang, ketidakadilan, atau perbuatan menyimpang lain yang membuat ia jauh dari kepatuhan atau ketaatan.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*, h.102.

⁷⁵ Noer, *Pemikiran Politik di Negara Barat*, h.75.

2. Bentuk-Bentuk Pemerintahan

Ibn Khaldun menemukan suatu tipologi negara dengan sistem pemerintahan dengan tolak ukur kekuasaan. Menurutnya sistem pemerintahan dibagi menjadi tiga bentuk:

- a. Pemerintahan yang natural (*siyasah thabi'iyah*), yaitu pemerintahan yang membawa masyarakatnya sesuai dengan tujuan nafsu. Artinya, seorang raja dalam memerintah kerajaan (*mulk*) lebih mengikuti kehendak dan hawa nafsunya sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat yang akibatnya rakyat sukar mentaati akibat timbulnya teror, penindasan, dan anarki. Pemerintahan jenis ini dizaman sekarang menyerupai pemerintahan otoriter, individualis, otokrasi, atau inkonstitusional.
- b. Pemerintahan yang berdasarkan nalar (*siyasah 'aqliyah*), yaitu pemerintahan yang membawa rakyatnya sesuai dengan rasio dalam mencapai kemaslahatan duniawi dan mencegah kemudharatan. Pemerintahan yang berasaskan Undang-undang yang dibuat oleh para cendekiawan dan orang pandai. Bentuk Pemerintahan seperti ini dipuji disatu sisi tetapi dicela disatu sisi. Pemerintahan jenis ini

dizaman sekarang serupa dengan pemerintahan Republik, atau kerajaan insitusal yang dapat mewujudkan keadilan sampai batas tertentu.

- c. Pemerintahan yang berlandaskan agama (*siyasah Diniyah*), yaitu pemerintahan yang membawa semua rakyatnya sesuai dengan tuntunan agama, baik yang bersifat keduniawian maupun keukhrawian. Menurut Ibn Khaldun model pemerintahan seperti inilah yang terbaik, karena dengan hukum yang bersumber dari ajaran agama akan terjamin tidak saja keamanan dan kesejahteraan di dunia tetapi juga di akhirat. Dan karena yang dipakai sebagai asas kebijaksanaan pemerintahan itu adalah ajaran agama khususnya Islam, maka kepala negara disebut khalifah. Oleh karena itu ia bertanggung jawab dalam memelihara kelestarian agama dan kesejahteraan duniawi rakyatnya.⁷⁶

Dari pembagian pemerintahan diatas, nampak bahwa Ibn Khaldun menempuh jalur baru dibanding al-Farabi dan Ibn Abi Rabi' dalam pengklasifikasian pemerintahan. Ia tidak memandang pada sisi personalnya,

⁷⁶ Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, h. 29.

juga pada jabatan khalifah itu sendiri, melainkan pada makna fungsional kekhalfahan itu sendiri. Sehingga menurutnya substansi setiap pemerintahan adalah undang-undang yang menjelaskan karakter suatu sistem pemerintahan.⁷⁷

B. *'Ashabiyah*, Negara dan Nasionalisme Di Indonesia

'Ashabiyah merupakan suatu jalinan sosial yang membuat “bangsa” bersatu padu, terlepas *'Ashabiyah* itu timbul karena ikatan kekeluargaan atau persekutuan. Dan *'Ashabiyah* mempunyai dua peran sosial. Pertama, ia menumbuhkan solidaritas dan kekuatan dalam jiwa kelompoknya. Kedua, ia mempersatukan berbagai *'Ashabiyah* yang bertentangan sehingga menjadi suatu kelompok manusia yang besar dan bersatu. Menurut Ibn Khaldun silaturahmi merupakan sifat alamiah manusia, dan hanya sedikit orang saja yang tidak memiliki sifat itu.⁷⁸

Adapun peran *'Ashabiyah* dalam kehidupan kemasyarakatan menurut Ibn Khaldun sangat dominan. *'Ashabiyah*-lah yang telah menjadi motor dari kekuasaan dan karena itu dapat dikatakan yang menjadi

⁷⁷ Khudairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, h. 159.

⁷⁸ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*. Penerjemah Ahmadi Thaha, h. 112.

penggerak utama dari sejarah manusia. Ibn Khaldun berpandangan tujuan '*Ashabiyah* adalah untuk mewujudkan al-mulk, karena '*Ashabiyah* mampu memberikan perlindungan, menumbuhkan pertahanan bersama, sanggup mendasarkan tuntutan-tuntutan dan kegiatan lain. Dengan kata lain bahwa tujuan dari '*Ashabiyah* adalah superioritas (*at-taghalul al-mulk*).⁷⁹

Dalam kehidupan bernegara (*nation*), Ibn Khaldun melihat terdapat dua kekuatan dominan yang membentuk nasib-nasib suatu masyarakat. Kekuatan pertama adalah kekuatan primitif dan utama yang oleh Ibn Khaldun disebut dengan '*Ashabiyah*, atau elemen-elemen pengikat masyarakat berdasarkan persekutuan, solidaritas sosial atau perasaan kelompok yang mampu menyatukan masyarakat, sebuah negara maupun sebuah kerajaan dan dalam kelompok yang lebih luas, dapat disamakan dengan patriotisme. Akan tetapi patriotisme dan '*Ashabiyah* bukanlah merupakan sinonim meskipun dalam bentuk yang paling ekstrimnya. Patriotisme adalah bentuk lain dari '*Ashabiyah* sebagaimana yang digambarkan oleh Ibn Khaldun. Patriotisme yang dimaksud Ibn Khaldun adalah patriotisme yang dilandasi karena rasa cinta yang tinggi dan loyal

⁷⁹ *Ibid.*, h.139.

terhadap kelompoknya atau sukunya yang berlandaskan agama. Patriotisme bentuk inilah yang menyatukan mereka dalam menjaga solidaritas kelompok dan negaranya.⁸⁰

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa '*Ashabiyah*' memiliki makna sosial dan politik. Bermakna sosial ketika '*Ashabiyah*' dengan solidaritas sosialnya mampu mewujudkan nilai-nilai dasar manusia sebagai makhluk sosial untuk saling menolong dan membantu sehingga terwujud dalam kesatuan suatu negara. Bermakna politis ketika '*Ashabiyah*' mampu menjadi perekat untuk menegakan dan mempertahankan suatu negara. Apabila suatu '*Ashabiyah*' kuat maka negara pun akan kuat tetapi jika '*Ashabiyah*' nya lemah maka akan berdampak pada lemahnya stabilisasi suatu negara. Dengan kata lain '*Ashabiyah*' menjadi suatu ikatan yang dapat melahirkan kekuatan negara dalam sistem politik.

Negara menjadi sebuah wadah bagi legitimasi '*Ashabiyah*' karena ia merupakan sumber kedaulatan bagi suatu negara yang berasal dari rakyat. Ia menjadi suatu kekuasaan yang sempurna ketika mampu menyatukan semua unsur kesukuan dan memaksakan kehendak penguasa untuk dipatuhi.

⁸⁰ Eugene. A. Myers, *Zaman Keemasan Islam: Para Ilmuwan Muslim dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Barat. Penejemah Maufur al-Khoiri*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka Utama, 2003), h. 72.

'*Ashabiyah* yang memegang kendali dalam suatu negara disebut sebagai '*Ashabiyah al kubra* . Ia adalah pemenang dari '*Ashabiyah-ashabiyah* yang ada, tidak dikendalikan dan berada di bawah '*Ashabiyah* manapun.

Saat ini konsep '*Ashabiyah* kurang begitu dikenal dalam suatu negara karena tergantikan dengan konsep nasionalisme. Kedua konsep ini merupakan bagian dari politik bernegara yang terkadang diidentikan atau dibedakan sama sekali karena memiliki persamaan dan perbedaan. Secara umum nasionalisme adalah sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada kegiatan bangsa atas nama sebuah bangsa. Maka, nasionalisme erat kaitannya dengan konsep *nation* dan isme yang dinamakan paham kebangsaan.

Menurut Ernest Renan nasionalisme merupakan 'rasa kesadaran yang kuat yang berlandaskan atas kesadaran akan pengorbanan yang pernah diderita bersama dalam sejarah dan atas kemauan bersama untuk merdeka dimasa depan.

Soekarno mengartikan nasionalisme sebagai berikut:

Nasionalisme adalah suatu tekad, suatu keinsyafan rakyat bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa. Nasionalisme berawal dari kesamaan sejarah, yang didalamnya terdapat rakyat yang memiliki tekad

untuk bersatu dalam suatu bangsa yang utuh tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan dan memiliki sebuah ikatan yang sangat kuat yang tidak akan mudah lepas apabila ada pihak yang ingin melepaskan ikatan.⁸¹

Menurut Limas Sutanto "nasionalisme di Indonesia memiliki peran dalam menegakan kemerdekaan dan kebangsaan sebagai hal yang fundamental bagi perjuangan bangsa Indonesia". Kebangsaan itu telah menjiwai dan mengantar pergerakan rakyat Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan.

Adapun pandangan Islam terhadap nasionalisme, pada umumnya menolak terutama nasionalisme sempit karena konsep ini bertentangan dengan universalisme Islam. misalnya menolak nasionalisme Islam karena bertentangan dengan konsep universalitas Islam. Menurutnya, ukhuwah dalam Islam tidak dibatasi dengan sekat-sekat negara. Selain itu, perkembangan nasionalisme sempit merusak solidaritas masyarakat Islam karena memandang Islam sebagai nasionalisme bentuk lain. Konsep

⁸¹ Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I*, (Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera revolusi, 1965), h. 3

nasionalisme Islam hanya mendikotomikan Islam sebagai sistem politik, ekonomi dan sosial semata yang bercorak material.⁸²

Menurut Roger Garaudy, nasionalisme merupakan warisan kolonialisme yang memecah belah umat Islam. Ia juga menolak pendapat Rousseau bahwa masyarakat terbentuk dari perjanjian sosial tetapi didasarkan atas keyakinan tiap-tiap orang untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan mulia dalam rangka mengurus semua kepentingan keseluruhan manusia dalam sejarah. Masyarakat memiliki sifat universal karena setiap anggotanya terpadu dengan anggota-anggota lain dan dengan segala perbedaannya.

Hasan al Banna mengungkapkan bahwa nasionalisme itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan universalisme Islam. Nasionalisme Islam menurutnya adalah cinta tanah air yang tidak dibatasi oleh batas-batas teritorial negara dan geografi. Oleh karena itu, batasan nasionalisme Islam adalah aqidah. Semua muslim di bumi manapun merupakan saudara dan keluarga yang harus dibela kepentingan-kepentingannya. Nasionalisme cinta tanah air merupakan fitrah yang terdapat

⁸² Maryam Jameelah, *Islam Dan Modernisme; Kritik Terhadap Berbagai Usaha Sekulerisasi Dunia Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1965), h. 232.

pada tiap manusia, karena ia dapat memperkuat ikatan kekeluargaan antara anggota masyarakat atau warga negara untuk kepentingan bersama. Ia adalah perjuangan untuk membela dan membebaskan tanah air dari cengkraman kolonialisme dan imperialisme merupakan suatu keharusan karena Islam pun menghendaki demikian.⁸³

Terlepas dari berbagai pandangan di atas, menurut penulis negara dan nasionalisme tidak dapat dipisahkan. Keduanya sangat erat kaitannya dengan bangsa, wilayah dan waktu. Sejatinya, '*Ashabiyah* memiliki persamaan dengan nasionalisme karena keduanya merupakan alat pemersatu untuk mempertahankan negara, dan menjadi pondasi bagi keutuhan suatu negara. suatu pengorbanan dan perjuangan untuk negara apabila makna '*Ashabiyah* yang digunakan adalah solidaritas kesukuan. ' *Ashabiyah* menyatukan seluruh '*Ashabiyah* dengan kekuatan diantara '*Ashabiyah* lain sehingga '*Ashabiyah* yang lemah harus tunduk, patuh dan melebur pada '*Ashabiyah* yang paling kuat. Demikian pula dengan nasionalisme yang merupakan upaya penyatuan seluruh suku dan suku yang paling dominan kekuatan sosial politiknya menjadi identitas nasionalisme.

⁸³ Hasan al Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimun*. (Solo: Era Intermedia, 2006), h. 39-40

Melihat unsur unsur nasionalisme yaitu perasaan satu keturunan, senasib, sejiwa dengan bangsa dan tanah airnya. Seseorang di katakan nasionalisme apabila ia memiliki perasaan nasionalisme yaitu Cinta tanah air, Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, Menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan pribadi dan golongan.⁸⁴ sangatlah relevan dengan unsur unsur konsep '*Ashabiyah* yakni rasa solidaritas atau kohesi sosial di antara anggota satu kelompok (negara) yang diperoleh dari kesadaran bahwa mereka berasal dari suku (bangsa) yang sama dan berjuang mempertahankan keutuhan negaranya.

Nasionalisme dan '*Ashabiyah* memiliki tujuan yang sama, mereka adalah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki rasa persatuan yang timbul karena pengalaman sejarah yang sama serta memiliki cita-cita bersama yang ingin dilaksanakan di dalam negara.

Namun jika merujuk pada kriteria nasionalisme maka '*Ashabiyah* berbeda dengan nasionalisme. Perbedaan *pertama* terletak pada awal mula terbentuknya '*Ashabiyah* dan nasionalisme. '*Ashabiyah* terbentuk atas dasar paksaan dan penaklukan sedangkan nasionalisme terbentuk atas dasar

⁸⁴ pengertian-dan-unsur-unsur-semangat.html (Di akses pada tanggal 8 Desember 2017)

kesadaran dan persamaan sejarah sebagai akibat dari kolonialisme dan imperialisme. *Kedua*, ruang lingkup '*Ashabiyah* menurut Ibn Khaldun tidak hanya seketurunan dan keluarga tetapi juga seagama, maka agama menjadi batas dari '*Ashabiyah* sedangkan nasionalisme dibatasi oleh batas-batas negara tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan. *Ketiga*, nasionalisme adalah konsep yang baru muncul pada masa modern sehingga tidak dapat disamakan dengan '*Ashabiyah* pun keduanya memiliki latar belakang historis yang berbeda. nasionalisme yang mengenal batas-batas negara dalam memperjuangkan kemerdekaannya serta dilandasi oleh kesadaran bersama sebagai akibat dari kesamaan sejarah. Sementara '*Ashabiyah* dilandasi oleh paksaan dan penaklukan sehingga kedua konsep ini memiliki latar belakang historis yang berbeda satu sama lain. *Keempat*, konsep '*Ashabiyah* tidak dapat digunakan dan digeneralisasi pada setiap masyarakat dan pemerintahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. *'Ashabiyah* secara etimologis berasal dari kata "*ashabah*" yang berartimengikat kesukuan atau kelompok solidaritas untuk menghadapi pihak luar. Penulis menerjemahkan *'Ashabiyah* dengan keluarga, kelompok para sahabat, semangat ras kelompok, patriotisme, nasionalisme, semangat nasional, dan partai. *'Ashabiyah* memiliki makna sosial dan politik. Bermakna sosial ketika *'Ashabiyah* dengan solidaritas sosialnya mampu mewujudkan nilai-nilai dasar manusia sebagai makhluk sosial untuk saling menolong dan membantu sehingga terwujud dalam kesatuan suatu negara. Bermakna politis ketika *'Ashabiyah* mampu menjadi perekat untuk menegakan dan mempertahankan suatu negara. Apabila suatu *'Ashabiyah* kuat maka negara pun akan kuat tetapi jika *'Ashabiyah*nya lemah maka akan berdampak pada lemahnya stabilisasi suatu negara. Dengan kata lain *'Ashabiyah* menjadi suatu ikatan yang dapat melahirkan kekuatan negara dalam sistem politik.
2. nasionalisme dapat diartikan sebagai sikap untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan bangsa, sehingga akan muncul perasaan satu

sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Demikian pula Konsep '*Ashabiyah*' mempunyai peran penting dalam mencegah konflik dan ketidakadilan dan untuk menjaga kebersamaan masyarakat, Ibn Khaldun berpandangan tujuan '*Ashabiyah*' adalah untuk mewujudkan *al-mulk*, karena '*Ashabiyah*' mampu memberikan perlindungan, menumbuhkan pertahanan bersama. '*Ashabiyah*' memiliki persamaan dengan nasionalisme karena keduanya merupakan alat pemersatu untuk mempertahankan negara, suatu pengorbanan dan perjuangan untuk negara. Seseorang dikatakan nasionalisme apabila ia memiliki perasaan nasionalisme yaitu Cinta tanah air, Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, Menempatkan persatuan, kesatuan. sangatlah relevan dengan unsur unsur konsep '*Ashabiyah*' yakni rasa solidaritas atau kohesi sosial di antara anggota satu kelompok (negara) yang diperoleh dari kesadaran bahwa mereka berasal dari suku (bangsa) yang sama dan berjuang mempertahankan keutuhan negaranya. Nasionalisme dan '*Ashabiyah*' memiliki tujuan yang sama, mereka adalah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki rasa persatuan yang timbul karena pengalaman

sejarah yang sama serta memiliki cita-cita bersama yang ingin dilaksanakan di dalam negara.

Dengan melihat gejala-gejala kemunduran '*Ashabiyah* yang telah terjadi pada negara Indonesia baik dalam bidang politik, agama, sosial, dan ekonomi dan sebagai solusi untuk mengatasi semua permasalahan di Indonesia ini adalah dengan menumbuhkan kembali ('*Ashabiyah*) yang dulu pada masa Indonesia dijajah rasa solidaritas ini kental sekali dan hasilnya adalah kemerdekaan bagi Indonesia. Di samping membutuhkan seorang pemimpin yang hebat dan tangguh juga dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk tetap menggalang persatuan dan kesatuan sehingga mampu mempertahankan dan menjaga keutuhan negara yang majemuk dan sangat luas dan terhindar dari berbagai masalah dalam lapisan masyarakat. seperti banyaknya tindakan anarkis yang sering terjadi, banyak konflik antar ras, suku dan agama dan berpegang teguh akan '*Ashabiyah* atau solidaritas sosial dalam membangun serta memajukan bangsa.

B. Saran

1. Perlu diketahui bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tentang '*Ashabiyah* atau Solidaritas Sosial perlu dikaji lebih lanjut. Konsep tentang '*Ashabiyah* atau Solidaritas Sosial tersebut harus direalisasikan dalam konteks ke-Indonesia-an.
2. Untuk itu kepada seluruh rakyat Indonesia, kaum akademisi dan khususnya civitas akademik Fakultas Syariah, kajian tentang '*Ashabiyah* atau Solidaritas Sosial di Indonesia masih minim, untuk itu ditelusuri lebih lanjut, terutama tentang tanggung jawab akan kelangsungan negara Indonesia yang berada dalam genggaman pemerintah, karena pemerintah yang memegang kendali dalam sistem kenegaraan.

Demikian akhir dari penulisan penelitian ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi penyusun dan intelektual Indonesia yang haus akan ilmu-ilmu pengetahuan baik sosial, politik, maupun agama. Semoga apa yang telah kita pikirkan dapat terealisasikan, dan selalu mendapat ridho Allah. Amin....”*Amin ya rabbal Alamin*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Hakimul Ikhwan. *Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004
- Ali Muhammad, Rusjdi. *Politik Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- alBanna, Hasan. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimun*. Solo: Era Intermedia, 2006.
- al-Khudairi, Zainab. *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*. Penerjemah Ahmad Rafi'. Bandung: Pustaka, 1995.
- A.R. Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibn Khaldun*. Jakarta: P.T. GramediaPustakaUtama, 1992.
- Bakry, Noor. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Budiyono, Kabul. 2007. *Nilai-Nilai Kepribadian dan Kejuangan Bangsa Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Consuelo, G Sevilla (dkk). *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet.I. Jakarta: UI Pres, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Glase, Cyril. *Ensiklopedi Islam (ringkas)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Penerjemah Masturi Irham, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah*. Penerjemah Ahmadi Thaha, Jakarta :PustakaFirdaus, 1986.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, k*
- JuLan, Thung dan Manan, Azzam. *Nasionalisme dan ketahanan budaya di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2011. `
- J.R Jaco. *Metode penelitian kualitatif, jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: grasindo, 2010.
- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik di Negara Barat*. Jakarta: Mizan, 2000.

- Raliby, Oesman. *Ibn Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Rukiyati, dkk. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: UNY Press, 2008.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara, ajaran sejarah dan pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, cet.XVI. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sunarso, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan PKN Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press. 2008.
- Winarno. *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai Lokal*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Yudohusodo, Siswono,dkk. *Nasionalisme Indonesia Dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta: YayasanWidya Patria, 1994.
- “Sejarah Nasionalisme dan Perspektif Islam”, imdadr@gmail.com diakses pada tanggal 22 Agustus 2017
- Nurcholish Madjid, “Agama Dan Negara Dalam Islam; TelaahatasFiqhSiyasahSunni,”[http://media.isnet.org/Islam/Paramadina/Konteks/Agama Negara](http://media.isnet.org/Islam/Paramadina/Konteks/Agama%20Negara)
- <http://lib.unnes.ac.id/20002/1/3401408006.pdf>
- http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_sej_053797_bab_ii.pdf
- <https://archivehidayatillah.wordpress.com>

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Sekumur, Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 11 Juli 1995. Ayahanda penulis bernama Ahmad Razali dan ibunda Sariah.

Penulis mempunyai 4 saudara kandung, yakni: M. Agus Pranata, Zulkhaidir, Junaidi, dan Wahyuni.

Jenjang pendidikan penulis berawal dari SD Negeri Pantai Tinjau Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan tamat pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat pertama yaitu SMIP Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian lagi dilanjutkan ke tingkat atas di MAS Ulumul Quran Stabat Kabupaten Langkat dan tamat pada tahun 2012.

Sewaktu kuliah di UIN-SU Penulis tinggal di Jalan Pimpinan No 144 Kecamatan Medan Perjuangan kota Medan. Penulis juga aktif dalam lembaga ekstra kampus yakni Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah, disinilah penulis mengisi luang waktu yang kosong saling bertukar pikiran bersama kawan-kawan.

